



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 5 (Lima)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 31 Mei 2022
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. 17.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI
Gedung Nusantara I (KK-IV)
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Sudin, S.E./ Ketua Komisi IV DPR RI /F-PDIP)
Acara : 1. RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023; dan
2. Isu-isu Aktual Lainnya.
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian Sekretariat
Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. Anggota Komisi IV DPR RI:
32 dari 53 orang Anggota dengan rincian:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8 dari 11 orang Anggota
 - 1) Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) Riezky Aprilia, S.H.,M.H.
 - 3) Ir. Mindo Sianipar
 - 4) Yohanis Fransiskus Lema, S.Ip.,M.Si.
 - 5) Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si. - Virtual
 - 6) Vita Ervina, S.E., M.B.A.
 - 7) Maria Lestari, S.Pd.
 - 8) Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. - Virtual
 2. Fraksi Partai Golongan Karya
3 dari 7 orang Anggota
 - 1) H. Dedi Mulyadi, S.H/Wakil Ketua Komisi
IV DPR RI - Virtual
 - 2) Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.
 - 3) Alien Mus
 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
5 dari 7 orang Anggota

- 1) G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
- 2) Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
- 3) Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc.
- 4) Ir. Dwita Ria Gunadi,
- 5) Dr. Azikin Solthan, M.Si. - Virtual
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
3 dari 6 orang Anggota
 - 1) Ir. Abdullah Tuasikal
 - 2) Julie Sutrisno
 - 3) Ir. Hj. Sri Kustina -Virtual
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
4 dari 6 orang Anggota
 - 1) H. Muhtarom, S.Sos.
 - 2) Luluk Nur Hamidah, M.Si.,M.P.A.
 - 3) Daniel Johan, S.E.
 - 4) Edward Tanur, S.H.
6. Fraksi Partai Demokrat
4 dari 5 orang Anggota
 - 1) Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 - 2) Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si
 - 3) Muhammad Dhevy Bijak Pawindu.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
4 dari 5 orang Anggota
 - 1) drh. H. Slamet.
 - 2) Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M.
 - 3) Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 - 4) Saadiyah Uluputty, S.T.
8. Fraksi Partai Amanat Nasional
1 dari 3 orang Anggota
 - 1) H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M
 - 2) Fachry Pahlevi Kanggoasa, S.E. - Virtual
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
0 dari 2 orang Anggota

B. Anggota Izin

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

- 1) K.H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I.

C. Pemerintah

1. Menteri Kelautan dan Perikanan (Sakti Wahyu Trenggono);
2. Sekretaris Jenderal (Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum.);
3. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si.);
4. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (Dr. TB Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc.);

5. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Irjen Pol. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H.);
6. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ir. Artati Widiarti, M.A.);
7. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han.);
8. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc.);
9. Plt. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Ir. Hari Maryadi, M.Si.);
10. Kuasa Inspektur Jenderal (Hadi Pramono, S.E., M.Si.);
11. Direktur Utama PT Perikanan Indonesia (Sigit Muhartono) ; dan
12. Direktur Utama PT Garam (Persero) (Arif Haendra).

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. /KETUA KOMISI IV DPR RI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang terhormat Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya,

Yang terhormat Saudara Direktur Utama PT Garam,

Yang terhormat Saudara Direktur PT Perikanan Indonesia (Perindo),

Perindo mana? Tahu *nggak* dia jadwalnya jam 13.00 WIB. Lain kali kalau itu jangan kasih masuk.

Hadirin yang kami hormati,

Mengawali rapat hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan jadwal acara rapat Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Bamus tanggal 28 Maret 2022 dan keputusan Rapat Internal 18 Mei 2022. Pada hari ini Selasa tanggal 31 Mei 2022 Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas RKA K/L dan RKP Kementerian/Lembaga tahun 2023, serta isu-isu aktual lainnya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang tata tertib, Rapat Kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.30 WIB)

Rapat Kerja ini kita mulai pada pukul 13.30 WIB dan akan diakhiri pada pukul 16.30 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) tentang Tatib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV;
4. Jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Sebagaimana kita ketahui cara pelaksana tugas Komisi dalam bidang anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib antara lain mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang meliputi kerja pemerintah serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K/L) dalam ruang lingkup tugas Komisi dan usulan Anggota, saya tegaskan lagi, usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah. Selanjutnya hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran.

Perlu kami sampaikan pelaksanaan Rapat Kerja ini sesuai dengan Surat Pimpinan Banggar nomor B/7379/AG.01.014/2022 tanggal 5 April 2022 mengenai Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 sebagai Acuan dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023 antara Komisi dengan Mitra Kerjanya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor S-353/MK.02/2022 dan B-301/M.PPN/D.P88.0402/04/2022 tanggal 18 April 2022 bahwa besaran Pagu Indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 sebesar Rp6,1 triliun. Saya *nggak* tahu ini Menteri Keuangan ini gimana caranya tahu-tahu bisa nyebut angka *enam koma satu*, padahal di dalam rapat sebelumnya kami

mengusulkan adanya penambahan, mungkin nanti Keuangannya *nggak* dengar atau *nggak* jelas gimana ini.

Selanjutnya melihat perkembangan perekonomian nasional dan global saat ini menunjukkan adanya tren pemulihan krisis pandemi Covid-19, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya berbagai kegiatan masyarakat di seluruh dunia yang menetapkan berbagai kelonggaran aturan beraktivitas dampak positif dari menurunnya kasus Covid-19. Tentunya peluang pemulihan ekonomi ini harus disikapi dengan KKP berbagai persiapan-persiapan akselerasi pencapaian target tahun 2023, seperti:

- Pematangan regulasi;
- Peraturan Menteri kontrak kerja sama dan PP penangkapan ikan terukur;
- Kebijakan prioritas lainnya;
- Bantuan masyarakat infrastruktur dan pengawasan; serta
- Penyediaan produksi komoditas unggulan sektor Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan internasional.

Untuk itu, Komisi IV mengingatkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan antisipasi adanya ketidakstabilan perekonomian global dan ketidakpastian perkembangan harga komoditas kelautan perikanan akibat konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang belum usai hingga hari ini, dampak dari konflik ini diperkirakan menjadi salah satu faktor risiko terbesar ke depan yang harus diwaspadai.

Selain itu, transformasi program dan kegiatan sektor kelautan perikanan wajib diperbaiki perencanaan oleh KKP, terlalu banyak program lebih sulit, terlalu banyak program lebih baik sedikit namun jelas manfaatnya dan tujuannya. Hal tersebut tentunya harus sejalan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelanjutan mulai dari hulu hingga hilir agar sistem investasi dan kenyamanan berusaha sektor kelautan dan perikanan dapat tercipta dengan baik dan lancar.

Sebelum saya mengakhiri pengantar ini, coba ditayangkan. Ini foto saat ini di Pelabuhan Muara Baru.

Lanjut fotonya.

Berapa, mungkin di atas 500 yang tidak berjalan ini.

Lanjut.

Ini situasi saat ini.

Terus.

Hidupkan yang tadi, yang wajahnya Indonesia yaitu Pelabuhan terbesar Muara Baru wajahnya gimana tadi, sampah-sampahnya tadi. Gedein. Kasih suara. Nah ini situasi sampahnya ini. Saya *nggak* tahu ini jadinya tanggung jawab siapa, pengelola Muara Baru, Pelindo, atau Dirjen Tangkapnya yang tidak pernah ke lapangan.

Pak Menteri tadi waktu ngobrol di dalam mengatakan sama saya, tugas salah satu Kementerian adalah menjaga kebersihan laut, tapi di depan mata

kita kita saksikan begini semuanya situasinya. Tanpa ada penanggulangan, tanpa ada pencegahan, tanpa ada sosialisasi bagi pelaku-pelaku. Coba gimana ini?

Saya juga mendengar kenapa kapal-kapal itu semua di ikan, nanti akan saya jelaskan setelah penjelasan Saudara Menteri.

Saya persilakan.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Terima kasih Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang, dan
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan Bapak Ibu Anggota Komisi IV DPR RI,

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencurahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan Rapat Kerja antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Anggota Komisi IV DPR RI.

Sesuai agenda Rapat Kerja hari ini perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan mengenai rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 disusun dalam kerangka menuju Indonesia sebagai negara maju. Lepas dari *middle income trade* sesuai visi Indonesia 2045 sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan pada tahun 2023 mencakup:

- percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sumber daya manusia;
- penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*;
- pemulihan dunia usaha;
- revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; serta
- pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 menetapkan target dan sasaran indikator pembangunan yakni:

- Pertumbuhan ekonomi 5,3 sampai 5,9%;
- Tingkat kemiskinan 7,5 sampai 8,5%;
- Tingkat pengangguran terbuka 5,3 sampai 6%;
- Rasio Gini 0,375 sampai 0,378;
- Indeks pembangunan manusia 73,31 sampai 73,49%;
- Penurunan emisi gas rumah kaca 27,02%; serta
- Nilai Tukar Petani menjadi 103-105; dan
- Nilai Tukar Nelayan 106-107.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023, KKP mendapatkan Pagu Indikatif tahun 2023 sebesar Rp6,1 triliun yang terdiri dari:

- Rupiah Murni sebesar Rp5,83 triliun atau sama dengan 95,52%;
- Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp138,19 miliar atau 2,26%;
- Badan Layanan Umum sebesar Rp59,67 miliar atau 0,98%; dan
- Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp75,75 miliar atau 1,31%.

Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 mengacu kepada arah kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan 2021-2024 dengan 3 program prioritas yaitu:

1. Penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan nelayan;
2. Pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor dengan komoditas unggulan antara lain: udang, lobster, kepiting, dan rumput laut;
3. Pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai dengan kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga kepunahan komoditas yang bernilai ekonomis tinggi.

Yang akan diperkuat dengan:

- Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan kualitas mutu untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;
- Pengelolaan ruang laut, perairan umum, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai landasan pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem karantina ikan; dan
- Penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM untuk pembangunan usaha kelautan dan perikanan.

Adapun target indikator kinerja utama KKP dalam RKP 2023 yaitu:

1. Pertumbuhan PDB Perikanan 4 sampai 6%;
2. Produksi Perikanan sebesar 30,31 juta ton, terdiri dari:
 - Perikanan tangkap 8,73 ton; dan
 - Perikanan budidaya 21,58 juta ton.

3. Ekspor hasil perikanan senilai USD 7,66 miliar;
4. Angka Konsumsi Ikan sebesar 61,02 kg perkapita;
5. Nilai Tukar Nelayan sebesar 107;
6. Luas kawasan konservasi seluas 29,1 juta hektar; dan
7. Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan sebesar 97%.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 KKP mendukung prioritas nasional yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
6. Mengembangkan lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,

Usulan Pagu Indikatif KKP Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Unit Kerja Eselon I, yaitu:

- Sekretaris Jenderal sebesar Rp600,07 miliar;
- Inspektorat Jenderal sebesar Rp80,31 miliar;
- Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp838,3 miliar;
- Ditjen Perikanan Budidaya sebesar *satu triliun nol tujuh miliar rupiah*;
- Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp936,26 miliar;
- Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp358,5 miliar;
- Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp360 miliar;
- Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1,34 Triliun;
- Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp513,5 miliar.

Sedangkan berdasarkan program, yaitu:

- Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp2 triliun;
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp157,15 miliar;
- Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp83,63 miliar;
- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp280,5 miliar;
- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3,58 triliun.

Berdasarkan jenis belanja Pagu Indikatif KKP tahun 2023, terdiri dari:

- Belanja Operasional sebesar Rp2,82 triliun; dan
- Belanja Non Operasional sebesar Rp3,28 triliun.

Sedangkan berdasarkan sumber pendanaan usulan Pagu Indikatif KKP tahun 2023 terdiri dari:

- Rupiah Murni sebesar Rp5,83 triliun;
- Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp76,54 miliar;
- PNBP sebesar *satu tiga delapan koma sembilan belas miliar*, dan
- PNBP-BLU sebesar Rp59,67 miliar.

Usulan kegiatan prioritas KKP tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perikanan Tangkap, antara lain untuk:
 - Implementasi penangkapan ikan terukur di 11 WPP berbasis kuota dengan sinergi kegiatan, antara lain:
 - Penyusunan alokasi Sumber Daya Ikan, alokasi usaha dan kuota;
 - Sistem Data dan Informasi; dan
 - Pengembangan serta rehabilitasi perikanan.
 - Pengembangan Kampung Nelayan Maju dengan dukungan sinergi kegiatan pemberdayaan nelayan, antara lain:
 - Bantuan sarana prasarana untuk nelayan;
 - Asuransi;
 - Bakti nelayan; dan
 - Pengembangan korporasi nelayan.
2. Perikanan Budidaya, antara lain:
 - Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor 4 komoditas: udang, lobster, kepiting, dan rumput laut; dan
 - Pengembangan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.
3. Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, antara lain untuk:
 - Peningkatan konsumsi ikan;
 - Pembangunan sistem rantai dingin;
 - Pengembangan usaha dan investasi; dan
 - Promosi dan pameran produk skala internasional.
4. Pengelolaan Ruang Laut, antara lain untuk:
 - Pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil;
 - Rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - Pengelolaan garam rakyat; dan
 - Perizinan kesesuaian pemanfaatan ruang laut.
5. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, antara lain untuk:
 - Pengawasan penangkapan ikan terukur;
 - Pengawasan usaha sektor Kelautan dan Perikanan.
6. Pengembangan SDM, antara lain untuk:
 - Pelatihan usaha bagi masyarakat kelautan perikanan;
 - Penyuluhan bagi kelompok usaha KP;
 - Pendidikan vokasi bagi masyarakat KP; dan
 - Inkubasi usaha KP.
7. Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, antara lain untuk:
 - Penerapan sistem jaminan mutu;
 - Pengembangan karantina ikan; dan
 - Pengembangan laboratorium *reference* dan akreditasi.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Kami sangat optimis bahwa sektor Kelautan dan Perikanan yang dikelola secara berkelanjutan dapat menjadi pendorong dalam ketahanan pangan nasional, meningkatkan kontribusi perekonomian bangsa, mendukung penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan sehingga perlu percepatan dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan. Untuk itu KKP mengusulkan tambahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp2,15 triliun yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan Pemerintah dalam penyusunan Pagu Anggaran tahun 2023 sehingga usulan Pagu Anggaran KKP tahun 2023 menjadi sebesar Rp8,25 triliun. Adapun rincian usulan tambahan anggaran sebagaimana tertera dalam bahan yang telah kami sampaikan.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Demikian yang dapat kami sampaikan pada rapat kerja kali ini. Kami mohon dukungan Komisi IV DPR RI terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran KKP tahun 2023. Seluruh saran, masukan, dan rekomendasi dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2023.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Shanti Shanti Shanti om,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasannya Saudara Menteri.

Ini ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai aset KKP yang mangkrak. Yang pertama, mesin pembuat pakan:

1. BLUPPB Karawang;
2. Keramba Jaring Apung *Offshore* yang KJA dari OS.

Ini sampai hari ini belum ada penyelesaian. Koordinasi penyelesaian KJA OS dengan PT Perindo, sayangnya Perindo-nya *nggak* datang tanpa surat lagi. Tolong di nanti Pak Sekjen ditegur Pak Sekjen karena ini menyangkut yang tadi yang saya lihat tadi sampah, sepertinya Muara Baru itu tempat penampungan sampah.

Kemudian ada lagi satu aset, saya bingung dikatakan mangkrak atau tidak, perihal sudah diaudit BPK tahun 2020/2021 mengenai pembangunan MIAMARI. Kemarin saya sudah tanyakan ke Pak Sekjen waktu kita RDP, MIAMARI ini anggarannya kalau *nggak* salah *multiyears*, nilainya Rp522 miliar.

Alhamdulillah yang di Morotai hari ini cuman ada bangunan mangkrak tidak ada apa-apanya.

Yang kedua, saya dapat info yang di Pangandaran pembangunannya ada, cuman ada kolam akuariumnya sedikit. Saya bingung juga, saya tidak menyalahkan Menteri yang sekarang tapi yang lalu, kok membangun tempat MIAMARI, tempat Lab, tempat pembelajaran, tempat pengetahuan kok di Morotai. Apa mungkin para mahasiswa para siswa yang ingin belajar, ingin mengetahui apa sih isinya laut Indonesia harus ke Morotai, berapa ongkosnya? Ini yang harus jadi catatan juga mau diapakan ini bangunan? termasuk juga yang di Pangandaran. Mungkin kalau Pangandaran okelah orang dari Bandung *nggak* begitu jauh, kalau Morotai gimana mau ke sananya? Ini yang harus dicermatin nih. Saya tidak mau lagi ada uang negara yang sedemikian mangkrak.

Termasuk juga yang tadi itu Jaring Apung, sampai saya katakan ini konsultannya pintarnya selangit. Kenapa saya katakan selangit? Mereka berpatokan dengan negara asal, *Offshore* ini kan asalnya dari Norwegia Jaring Apung ini. Mereka ada *nggak* siklus, saya juga bingung pada waktu itu (*suara tidak jelas*) kan banyak orang pintar di KKP yang periode lalu ada yang S2, ada yang S3 yang saya rasa yang belum ada cuma S7 karena S7 itu yang punya cuma Samsung. Harus kan ada siklus 5 tahun sekali ombak besarnya berapa, arus bawah berapa, kencangan angin berapa, 10 tahun sekali ada siklusnya ini kan *nggak* ada belajar di taruh. Kalau *nggak* salah waktu itu Pak Jokowi jadi datang apa tidak, tahu-tahu tenggelam, yang menanggung siapa? Makanya ini saya sangat sayangkan Perindo hari ini *nggak* datang, saya juga nanti mau mempertanyakan masalah yang tadi itu.

Saya persilakan perwakilan fraksi untuk bertanya.
Pak Budi silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Ketua.

Kita masuk ke sesi tanya jawab melalui juru bicara fraksi. Kalau boleh kita *straight to the point* Bapak/Ibu sekalian, jangan panjang lebar tapi kita fokus pembahasan yang sudah tadi didahului oleh Bapak Menteri KKP.

Kita awali dari Fraksi PDI Perjuangan, Bu Riezky Aprillia.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan, Pak Budi, Pak Sudin.

Pertama, terima kasih atas jawaban tertulis yang sudah diberikan, pada saat rapat terakhir kita sempat diskusi dan jawaban sudah kami terima. Menindaklanjuti jawaban tersebut, ini pas banget Pak Dirjen PB-nya dekat sama saya. Pak Menteri, permasalahan hari ini budidaya itu bukan hanya sekedar perbenihan, bukan masalah benih indukan, dan lain-lain. Benih dan

indukan kalau harga pakan 1 tahun naik 3 kali lipat itu seperti apa solusinya? Saya tidak mau berbicara permasalahannya, tapi kita coba mencari solusi di sini, memang terjawab di sini ya di halaman jawaban saya itu di halaman 32. Kalau saya tidak salah bahwa solusinya memang harus segera mungkin bagaimana mengembangkan pakan-pakan mandiri ya, karena kalau alasan apa sumber apa sih bahan mentahnya itu yang mungkin mahal ya saya rasa itu bukan jawaban juga, bukan solusi juga. Kita juga sama-sama tahu hari ini peningkatan bahan baku itu memang apapun pasti ini.

Nah di sini dijawab untuk menyesuaikan *roadmap*, Pak TB *roadmap*-nya seperti apa? Kita *support* kok Perikanan Budidaya ini ya, tapi *roadmap*-nya ini hulu hilir ini juga harus dipikirkan. Kenapa saya bilang hulu hilir? Kembali lagi, pada saat benih, indukan, pakan, masuk ke konsep kampung yang ada di halaman 14 paparan Bapak. Konsep Kampung ini tadi ada berapa lokasi ya Pak, 200-an ya kalau *nggak* salah, 130. Nah lokasi ini di mana saja gitu, lebih baik daripada karena kan anggaran KKP ini *Extra Ordinary* hari ini, sedikit meledek sih Pak Menteri sebenarnya ya. Nah fokus lokasi dan juga diiringi Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Sekjen dengan SDM terkait sosialisasi, bimbingan, supaya hilir produknya perikanan budidaya ini karena hari ini kan yang paling *visible* itu adalah perikanan budidaya ya.

Dan kemudian kembali lagi masuk ke poin ke-3. Setelah ini nanti konsep kampungnya jalan, lokasinya jalan, menjadi pertanyaan juga saya lihat tadi ada pengembangan ikan lokal di halaman 14 Sarprasnya, ikan lokal itu jenisnya ikan apa? Kan begitu, supaya disesuaikan. Oke lah sekarang kami dari Sumatera Selatan itu Belida udah di *brand*, oke, solusinya apa? Ada Gabus, ada juga Baung. Nah ini ikan ini kan ikan lokal yang sebenarnya menjadi komoditas yang harganya juga tinggi, masa' Palembang aliran Sungai Batanghari itu yang luar biasa dari Lampung memecah sampai ke wilayah Jambi dan lain-lain itu Gabusnya Pak Menteri dari Papua, kan *nggak* masuk akal Pak ya. Jadi supaya menjadi perhatian bahwa kampung itu dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal gitu maksudnya dan hilirnya seperti apa? Palembang terkenal dengan pempek, kan *nggak* mungkin, wajar aja *entar* orang pendatang wisatawan ini komplain kok pempeknya mahal? ya iyalah kalau gabusnya dari Papua, iya kan. Nah jadi penting juga supaya kita sama-sama.

Jadi saya garisbawahi Pak Menteri. Permasalahan pakan, satu. Kedua, konsep kampungnya DJPB ini, lokasinya ya kan, dan bagaimana penguatan sumber daya manusianya ya, jangan dikasih program tapi *nggak* diurusin kan seringkali kayak begitu. Kemudian ketiga sarpras terkait ikan lokal.

Nah ke-4 di luar Dirjen Budidaya. Saya juga meminta kemarin masalah PNBPN ya dari target 1,9 T mungkin tercapainya *enam ratusan miliar*. Nah terus saya *break down* ulang Pak Menteri ya terkait dengan WPP, saya pengen tanya nih WPP ini terakhir datanya tahun berapa Pimpinan, karena apa? kita paham Pak Menteri punya cita-cita seperti yang ada di Norway mungkin. Tapi maksud saya ini harus di *break down*, *How do you know the fish exist* jumlahnya segitu gitu loh, nah tolong ditanya kapan terakhir ikan ini ada dengan jumlah sekian baru bicara PNBPN-nya sekian. Ya karena kan kita hari ini membahas RKA K/L,

APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kenapa kita bahas PNBPN? salah satunya PNBPN ini adalah pendapatan yang dimiliki oleh negara. Jadi kita ini fungsi pengawasannya yang di sini yang kita jalankan, karena itu tadi kembali lagi anggarannya KKP kan luar biasa besarnya sampai *nggak* bisa memenuhi program-program berkelanjutan kan begitu, karena apa? PR-nya NTP eh *sorry* NTN ini, ini kan katanya program salah satunya meng-apa kemiskinan ekstrim, menekan angka kemiskinan ekstrim. Mohon maaf di forum yang terhormat ini harus saya sampaikan Nilai Tukar Nelayan itu paling rendah hari ini, gimana cara meningkatkan itu, itu yang menjadi PR kita bersama. *As a long as* kita *nggak* punya *Roadmap*, tidak punya keseriusan, saya rasa tidak akan berjalan maksimal.

Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Bu Kiki.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Gerindra Bu Dwita Ria Gunadi, silakan Bu.

F-P.GERINDRA (Ir. DWITA RIA GUNADI):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Saudaraku Bapak Menteri Kelautan Perikanan, Bapak Sekjen, Kementerian, dan juga pejabat Eselon I yang saya hormati,

Izinkanlah saya mewakili Fraksi Partai Gerindra Dwita Ria Gunadi A-76 Dapil Lampung untuk memberikan tanggapan, masukan, pertanyaan, dan catatannya sebagai berikut.

Melihat pagu indikatif belanja KKP tahun 2022 sebesar Rp6,115 triliun, kemudian pada tahun 2023 ini Rp6,104 triliun berarti ada pengurangan Rp11,5 miliar, nah kami ragu bahwa sasaran program akan tercapai. Untuk itu, kami Partai Gerindra mendukung usulan tambahan pagu anggaran KKP tahun 2023 ini sebesar Rp2,15 triliun sehingga keseluruhan menjadi Rp8,254 triliun dan yang kami anggap ini adalah wajar dan dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional.

Kemudian yang kedua, Pak Menteri banyak hal yang ingin kami pertanyakan, tapi nanti mungkin ada secara khusus RDP dengan Eselon I karena di sini banyak terkait usulan tambahan-tambahan anggaran tahun 2023

yang mana kami belum melihat di mana lokasinya, kemudian pengelolaannya seperti apa, *output*-nya juga ini seperti apa. Nah, ini kami akan nanti lebih fokus mungkin secara khusus membahas ini bersama Eselon I karena di sini tentu saja sebagai fungsi pengawasan kami sebagai legislatif agar program-program ini dapat berjalan dengan baik.

Yang ketiga, Pak Menteri kami juga minta penjelasan terkait bentuk kriteria kampung perikanan budidaya pada program tahun 2023 ini bagaimana sinkronisasinya dengan program berbasis kampung yang lain Kalaju dan juga Desa pesisir tangguh. Nah, misalnya apakah mereka juga harus menjaga lingkungan dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca.

Yang keempat, Pak Menteri terkait dengan biaya operasional dan pengawasan perawatan Armada pengawas yang besar, Fraksi Gerindra meminta penjelasan berapa jumlah armada pengawas, patroli berupa kapal dan *speed boat* yang dimiliki oleh KKP. Yang kita tahu bahwa laut kita ini sangat luas sehingga kita juga perlu mengetahui berapa sebenarnya yang dimiliki sehingga patroli ini bisa betul-betul mengawasi *Illegal Fishing* yang terjadi di laut-laut Indonesia.

Ini menyangkut Dapil Pak Menteri. Dalam usulan kerja DJPT tahun 2023, Fraksi Gerindra ini belum melihat adanya usulan rencana berupa bantuan kapal berukuran kecil yang 5GT, sementara dalam beberapa Raker, RDP telah disampaikan berulang kali terkait kapal kecil yang banyak dibutuhkan oleh nelayan kecil. Untuk itu kami juga meminta penjelasan agar aspirasi kami ini bisa di realisasikan.

Kemudian juga menyangkut Dapil Pak Menteri, untuk Bioflok. Bioflok ini tahun 2022 ini kita mendapatkan 9 unit per Dapil, tapi tahun 2023 ini hanya ada 405 unit, kalau dibagi 55 Dapil hanya 7 unit per Dapil. Nah, ini kami mohon tidak dikurangi Pak karena ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembudidaya ikan.

Yang terakhir Pak Menteri, dalam pengelolaan destinasi wisata bahari berbasis masyarakat pada program desa wisata bahari. Tahun 2023 ini ada 10 kawasan usulan untuk program ini dan tentu saja kami ingin mengetahui bagaimana apa namanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan bagi desa-desa yang mendapatkan sebagai desa wisata bahari dan juga kami juga meminta pendampingan masyarakat secara berkelanjutan baik sosialisasi, pelatihan, dan lain sebagainya. Untuk desa wisata ini juga mungkin kita bisa berkoordinasi dengan pemilik-pemilik wisata di desa Pak itu ada Pokdarwis sehingga juga kita bisa berkolaborasi karena wisata ini tentu saja tidak hanya untuk masyarakat di sekitar yang menikmatinya tapi kita berharap bahwa wisata wisata bahari ini akan dinikmati oleh banyak orang yang akan datang ke sana.

Mungkin itu saja tanggapan kami dari Fraksi Gerindra.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik, terima kasih.

Bapak/Ibu sekalian, kalau saya boleh usul. Kalau yang urusannya mengenai aspirasi Dapil yang secara spesifik mungkin kita nanti bisa diskusikan lebih dalam lagi dengan Eselon I. Mungkin esensinya saja, tetapi memang kalau ada permasalahan, ada temuan, silakan disampaikan. Tapi kalau masalah jumlah aspirasi nanti kita bisa sesi pendalaman dengan Eselon I.

Kami persilakan berikutnya dari Fraksi PKB, Pak Daniel Johan. Silakan Pak Daniel.

F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Iya.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan segenap Anggota yang kita hormati,
Pak Menteri dan segenap jajaran,

Yang pertama, Pak Menteri kita masih ingat pertama kali kita Raker di sini Pak Menteri dengan sangat semangat bicara mengenai budidaya lobster. Nah yang kita mau tanya sejauh mana perkembangannya dan bagaimana kelanjutan *backup* program sehingga budidaya lobster tersebut semakin jelas ada harapan dan bisa kita wujudkan. Karena fakta hingga detik ini penyelundupan benur itu tetap berjalan Pak, tidak berhenti, sehingga harus ada jalan keluar terobosan yang memberikan harapan bukan hanya bagi para nelayan kecil benur, tetapi juga dalam konteks membangun industri lobster di Indonesia.

Ada usulan kemarin RDP itu sangat menarik dan itu sangat realistis, kenapa kita tidak melakukan kerja sama langsung dengan Vietnam? Kita *sharing* aja misalkan apakah posisi Indonesia *majority* atau Vietnam *majority* 60:40 karena sumbernya 90% lebih itu dari Indonesia, tanpa Indonesia budidaya lobster di Vietnam akan tutup. Kalau perlu Pak Budi bisa mimpin kita melihat di Vietnam dan merintis kerja sama, kalau bisa Pak Menteri ikut bersama kalau anggaran *nggak* ada *entar* Pak Budi yang akan mikirkan. Saya rasa terobosan-terobosan ini harus dilakukan Pak karena itu angkanya triliunan, bukan sedikit ya. Ini nelayan kecil benurnya tercekik mereka penghidupannya di menjadi ilegal kan gitu ya tetapi terobosan yang lain kita *nggak* bisa lakukan, jadi itu mungkin harus dipikirkan ada terobosan yang harus dilakukan.

Yang kedua, kemarin kita sempat ke kunjungan ke salah satu lokasi ya jadi *integrated shrimp farming development program* senilai nilainya sangat besar 370 M itu akhirnya lokasinya itu di mana aja Pak dan sejauh mana progresnya sudah berjalan? Karena kalau di lokasinya Pak Darori sampai sekarang belum jalan nih padahal ini sudah bulan 6 ya. Jadi kita ingin memastikan ini berjalan baik dan walaupun berjalan jangan sampai mangkrak di depannya karena anggarannya besar, tetapi ini menjadi tumpuan, harapan bagi para pembudidaya yang terlibat sekaligus tumpuan harapan menjadi prestasi ini berkembangnya budidaya nasional ya.

Yang ketiga, nah ini penting. 2021 ekspor kita ditolak, nilainya sangat besar USD 27 juta itu hampir lebih besar dari nilainya udangnya Pak Menteri, lalu peningkatan penolakan ekspor justru meningkat dari 2020 meningkat 232 kasus di 2021. Nah, ini peran strategis yang harus dilakukan Pak Menteri di KKP melakukan diplomasi konkrit agar hambatan-hambatan produk ekspor kita tidak terjadi, bahkan kerjasama-kerjasama yang selama ini memberatkan posisi Indonesia itu bisa di terobos. Kita jangan kalah dengan negara ASEAN lain yang tarifnya nol sementara di Indonesia untuk ekspor memiliki tarif, sehingga kita minta langkah konkrit dan laporan berikutnya itu hal-hal apa yang sudah dilakukan secara strategis.

Yang keempat, saya sudah sekian kali, terakhir lagi menerima keluhan jerit tangis para petani garam, Pak. Kita dari tahun ke tahun dari sebelum zaman Ibu Susi terus berikutnya sampai ke Pak Menteri sekarang ini belum ada terobosan yang kita lakukan secara berhasil dan masif untuk memberikan jalan keluar bagi para petani garam yang selalu menangis saat ini. Jadi kita juga mendorong ada suatu program terobosan yang bisa memberikan jalan keluar di sepanjang Pantura termasuk di pulau Madura petani-petani garam agar mereka bisa terjawab segala kesulitannya.

Terakhir, Raker pertama juga sudah saya sampaikan Pak. Ada potensi sangat besar yang sebenarnya lebih jauh lebih besar dari udang, jauh lebih besar daripada ikan, itu kepiting. Kok kayaknya Pak Menteri meloloskan begitu saja kepiting. Kepiting itu *nggak* ada hama Pak, panennya selama barramundi misalkan, *nggak* selama udang, 3 bulan 4 bulan sudah panen. Tetapi kunci keberhasilan kepiting adalah di pembenihan, sementara kita sudah ada Balai yang sudah *proven* bisa mengembangkan pembenihan kepiting. Kalau pembenihan karena kalau dari alam tentu *nggak* cukup, sekarang ekspor kita paling baru 5-10% saja yang kita berhasil penuhi, 90% menunggu, harganya lebih tinggi memberikan. Jadi pembudidaya di sepanjang Pantura itu kalau bisa diberdayakan itu sangat baik ya tetapi intinya ada penguatan di Balai pembenihan karena itu kuncinya, kalau pembenihannya *nggak* ada ya *nggak* akan jalan, jadi mohon perhatian dari Pak Menteri.

Demikian.
Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak DJ.

Saya rasa ada beberapa poin penting tadi Pak Menteri yang sudah diungkap Pak Daniel Johan, tapi kita teruskan terlebih dahulu. Berikutnya dari Fraksi NasDem Pak Abdullah Tuasikal.

Silakan Pak Abdullah.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi IV,
Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen, beserta jajarannya,

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Saya mewakili Fraksi Partai Nasdem dalam Rapat Kerja hari ini dengan Pak Menteri beserta jajarannya.

Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi terhadap peningkatan realisasi PNBPK KKP dan peningkatan nilai ekspor produk perikanan sehingga neraca perdagangan mengalami *surplus*. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor Kelautan dan Perikanan terus produktif dan berkontribusi positif pada perekonomian nasional. Maka dari itu sudah sepantasnya Pemerintah memberikan perhatian khusus pada sektor Kelautan dan Perikanan melalui dukungan anggaran memadai sehingga KKP dapat mengelola potensi sektor Kelautan dan Perikanan nasional secara optimal dalam rangka peningkatan pendapatan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan kita. Untuk itu Fraksi Partai NasDem mendukung usulan tambahan anggaran KKP tahun 2023.

Yang kedua, Fraksi Partai Nasdem mendorong KKP untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung dalam rangka penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur. Infrastruktur yang memadai seperti peningkatan sarana prasarana pelabuhan penangkapan ikan yang disertai sistem yang efektif untuk melakukan pengawasan aktivitas penangkapan ikan dan data jumlah tangkapan diharapkan dapat sesuai dan secara optimal meningkatkan pendapatan negara.

Fraksi Partai Nasdem juga mendorong KKP untuk mempercepat proses keluarnya regulasi yang menopang kebijakan penangkapan ikan terukur agar potensi pendapatan negara dari sektor Kelautan dan Perikanan khususnya subsektor Perikanan Tangkap dapat segera terealisasi.

Pak Menteri yang saya hormati dan saya banggakan,

Pertama, kami kira dalam kegiatan RDP, Raker seperti ini kita harus benar-benar kita komitmen ya soal masukan-masukan yang ada pada Anggota Komisi IV ya, bukan saya ulang tapi saya ingatkan aja. Seperti Motor GT 5 ya yang dibutuhkan sebenarnya kami butuhkan, tapi kalau 4 itu kecil itu kecil jumlahnya kecil. Tapi kalau dikasih sesuai dengan potensi masyarakat yang ada di sana, dari 4 bisa 30, bisa 40 ya, jadi untuk kepentingan aspirasi dan kepentingan pemanfaatan saya kira ini jelas.

Yang kedua soal bantuan benih. Bantuan benih kalau *nggak* salah kita satu juta ekor, apakah saya kira Maluku dan mungkin Indonesia Timur ini juga jadi kendala. Saya yakin bahwa setiap aktivitas kegiatan pembangunan atau proyek itu sebelumnya dilaksanakan dengan tender, saya kira satu juta ekor kali sekian banyak itu kan sudah sekian juta ekor, ini kan sistem tender dan kalau tidak salah itu tendernya ada pemenang proyek dulu setelah itu jumlah baru di tempat-tempat aspirasi. Saya kita dalam pelaksanaan ya palingnya mungkin ya kalau di Maluku itu dari satu juta itu palingnya sekitar 20%, pertanyaannya lalu 80% itu dikemanakan? apakah memang waktu itu lalu habis itu ada pemotongan atau sesuai dengan apa ya sesuai dengan anggaran terbagi ini sistemnya seperti apa. Jangan sampai satu juta ekor kali sekian lalu yang mendapatkan sekian banyak sisanya sekian belum terdistribusi, nah anggarannya seperti apa, apakah ini swakelola? lalu jumlah anggarannya apa disesuaikan dengan yang distribusi. Itu yang kedua.

Yang ketiga, saya kira proyek ini kami selalu memberikan apresiasi ya setiap kegiatan Kementerian saya kira programnya profesional dan untuk kepentingan masyarakat. Tapi kami lihat yang ada di bawah seakan-akan kegiatan ini setelah dibagi lalu habis itu dilupakan ya tahun depan kita buat lagi tahun depan kita buat lagi, ya akhirnya hasilnya kita tidak dapat. Kita tahu bahwa daerah-daerah kita memiliki potensi sumber daya laut atau sumber daya air tawar sangat pesat termasuk di Maluku, untuk itu untuk soal apa ya untuk menggali potensi sumber daya yang ada kami juga dari Maluku juga minta seperti provinsi-provinsi lain yang juga disiapkan ekskavator untuk menggerakkan potensi sumber daya air tawar yang ada di sana.

Lalu mungkin yang ketiga Pak Menteri, saya kira ada kala kita orang Maluku, kadangkala kita ngotot bahwa (*suara tidak jelas*) prinsipnya kami mendukung apa yang diperlukan oleh Kementerian Perikanan ya mungkin apa rencana Perpres juga mungkin dalam rangka harmonisasi Insya Allah segera juga keluar. Tapi kalau untuk penangkapan terukur Pak Menteri, saya kira juga saya kira udah tapi diharapkan oleh kita kan sudah ada berapa dermaga yang ditunjuk ya sedangkan di Maluku itu ada bahkan ada 4 ya salah satunya *Ambon New Port*-nya tapi nanti ada di dermaga perikanan, saya kira itu sudah cukup bagus. Ya pertanyaan saya itu gini Pak Menteri, ini kan pasti wlayah-wilayah kita sangat cukup luas bukan aja di Maluku, Maluku Utara, mungkin Papua itu semuanya sama. Tapi kalau Pelabuhannya udah ditetapkan, lalu gimana dengan pulau-pulau yang lain ya gimana dengan pulau-pulau lain dalam rangka pendaratan ikan ini yang kita mungkin ada sinkronisasinya yang mungkin ada apa dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mungkin dengan Pemerintah Provinsi Maluku coba diatur agar benar-benar lumbung Ikan nasional, lalu penangkapan terukur benar-benar untuk kepentingan negara dan

mengakomodir ya mengakomodir nilai-nilai lokal yang ada di Provinsi Maluku, ya Pak Menteri ya prinsipnya kami mendukung. Ya, karena apapun juga soal Maluku ini adalah kepentingan negara *nggak* ada yang boleh hambat, tapi dalam kepentingan negara juga itu adalah kepentingan nelayan tradisional.

Lalu mungkin yang terakhir Pak Menteri, ini kan hanya kan mendapatkan kuota itu kuota itu, itu adalah juga adalah masyarakat nelayan lokal ini kan juga harus dapat, harus terbentuk dalam satu setiap koperasi ini terserah nanti mungkin aturannya seperti itu. Lalu ada pembagian kalau *nggak* salah sekitar 70% dan 30% ya 30% untuk masyarakat lokal ya, apa berapa ya? 20 dan 80 ya Pak Menteri, saya kira udah cukup bagus. Pertanyaan saya itu kalau setelah dibatasi 80 dengan 20, apakah 20 ini orang yang terakomodir mempunyai koperasi atau ini diatur oleh aturan-aturan khusus atau regulasi karena apapun juga kalau memang 20% ini ya diberikan kepada koperasi dia memiliki apa namanya ada secara akomodir saya kira ini juga tidak tidak objektif ya, padahal lokasi wilayah yang ada itu itu memiliki masyarakat didalam masyarakat itu itu adalah nelayan-nelayan yang nantinya mendapatkan izin. Saya berharap agar ini ada penjelasan dan benar-benar terakomodir kepentingan masyarakat yang tidak akan menumbuhkan instabilitas ya dari kepentingan-kepentingan masalah-masalah itu.

Ini Pak Menteri saya kira saya sampaikan mudah-mudahan penangkapan terukur, lalu apa lumbung ikan nasional ini benar-benar terwujud untuk kepentingan masyarakat. Dan harapan kita Pak Menteri, ini harapan kita.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terakhir ya Pak.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Iya ini terakhir.

Saya kira nanti coba dipikirkan gimana agar benar-benar industri ada di situ ya. Jadi jangan sampai ada cuma pendaratan (*suara tidak jelas*) itu transportasi untuk keluar, lalu kepentingan-kepentingan industri seperti apa. Karena kita butuh juga adalah industri yang mengakomodir kepentingan masyarakat dan juga kasih manfaat untuk pendapatan asli daerah.

Saya kira demikian, Pak Menteri.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih, Pak Abdullah.

Berikutnya Bu Saadiah dari Fraksi PKS, kami persilakan.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore,
Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Pak Menteri, para Dirjen, dan jajaran Kementerian KKP yang saya hormati,
Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,

Mewakili Fraksi PKS, saya menyampaikan beberapa pandangan. Yang pertama Pak Menteri pada dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023 Pemerintah mengapresiasi performa sektor perikanan khususnya terkait sistem penangkapan kuota di empat zona industri perikanan dan penerapan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) dan izinkan kami sedikit mendalami *statement*, mendalami capaian ini dengan memberikan beberapa *statement*.

Yang pertama ini melihat dana pagu dana dari Kementerian Keuangan yang masih tetap begitu ya masih *enam koma satu koma empat triliun* pada tahun 2023 yang sama dengan tahun kemarin, rasa-rasanya memang tidak sesuai begitu loh dengan performa dari Kementerian KKP kita. Nah, sementara berbagai program atau berbagai capaian yang ingin diraih ya di Kementerian KKP menargetkan PNBPN yang cukup fantastis ya Rp12 triliun dan sebenarnya dari performa kerja dan penilaian di kerangka ekonomi makro kita ini memang menjadi satu ukuran sebenarnya. Pertanyaan saya sebesar seberapa besar daya ungkit ekonomi dalam kebijakan penangkapan berbasis kuota tersebut tersebut khususnya dampaknya terkait perekonomian wilayah.

Yang kedua, kami meminta Menteri KKP menjelaskan progres pelaksanaan sistem perikanan terukur khususnya terkait keberhasilan dan kendala penerapannya. Kami banyak menemukan masyarakat nelayan khususnya nelayan kecil di daerah yang merasa dirugikan dengan kebijakan perikanan terukur yang dianggap lebih pro kepada perikanan besar, sektor industri.

Yang ketiga, Fraksi PKS meminta penjelasan terkait kebijakan implementasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota, penerapan penangkapan ikan yang legal dilaporkan dan sesuai aturan dan penggunaan Alat tangkap yang lebih produktif sebab di lapangan terjadi beberapa gesekan khususnya terkait zona dan kuota penangkapan ikan. Kami juga meminta KKP menjelaskan terkait sistem logistik ikan nasional ini termasuk infrastruktur apa yang sudah dikembangkan pemerintah untuk mendukungnya.

Yang kedua, Pak Ketua dalam peta sistem kuota perikanan sebenarnya saya mengusulkan lagi Pak Menteri kita ada FGD khusus lah terkait dengan

kebijakan penangkapan ikan terukur ini karena ada berbagai catatan dari masyarakat dan juga dari para LSM ya yang memberikan catatan-catatan kepada Komisi IV dan juga kepada kami yang punya daerah pesisir agar di satu sisi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri bahwa konservasi yang menjadi panglima tetapi ternyata beberapa kejadian dan implementasi di lapangan itu malah kebijakan ini memberikan ruang yang justru lebih besar kepada sektor industri Pak Menteri dalam pembagian zona dan kuotanya. Saya ambil contoh Pak Menteri misalnya di peta sistem kuota perikanan di pembagian zonanya ini di pembagian zona 01, 02, sampai 04. Kalau melihat sebaran zona penangkapan untuk industri jauh lebih besar daripada kuota nelayan lokal, ini berpotensi diskriminatif dan olehnya itu kami meminta Menteri KKP untuk menjelaskan terkait dengan pembagian kuota ini.

Yang kedua, zona pelayanan lokal sebagian besar merupakan daerah yang sudah hampir atau lebih mengalami *Overfishing*. Yang ketiga, bagaimana strategi KKP menjaga eksistensi pelaku perikanan skala kecil khususnya yang akan masuk ke zona perikanan industri. Dengan adanya kebijakan pungutan PNBP yang baru, pelaku usaha kecil akan sulit mendapatkan kuota dikarenakan harus membayar lebih mahal. Dalam penjelasan Pak Menteri juga sudah menyampaikan bahwa PNBP tidak menyasar nelayan kecil kira-kira begitu ya Pak Menteri ya, dia lebih kepada di industri lah. Artinya di kapal-kapal kalau misalnya kita kemudian mengukurnya dengan kapal-kapal di bawah ukuran 30GT, Pak Menteri menyampaikan bahwa tidak menyasar itu gitu, tetapi bagaimana strategi KKP menjaga eksistensi pelaku perikanan kecil ketika kebijakan ini diterapkan dan diimplementasikan.

Soal pungutan hasil perikanan ini Pak Menteri, Pemerintah Daerah mengaku keberatan dengan besarnya pungutan yang diterima nelayan. Pak Dirjen Tangkap Pak Zaini, pungutan hasil perikanan naik hingga 1000 sampai 2000 kali lipat tergantung ukuran kapal yang dirasakan masih sangat memberatkan bagi pelaku usaha perikanan daerah, di data-data yang disampaikan ada di PP Nomor 19 di pra-produksi, kemudian di PP Nomor 75, dan PP Nomor 85, coba kita bandingkan diantara regulasi ini gitu. Pra produksi di tiga regulasi ini ternyata ada berapa kali lipat kenaikannya dan masyarakat kecil kita mengeluh soal kenaikan harga yang demikian tinggi. Kenaikan harga pasokan ikan juga mendorong kenaikan besaran pungutan hasil perikanan PHP yang dibebankan ke pelaku usaha perikanan.

Beberapa data juga kami sampaikan bahwa harga patokan ikan cumi-cumi, Pak Menteri naik hampir 5 kali lipat 500% dari Rp16.000,- menjadi Rp75.000,- dan persentase kenaikan harganya cukup tinggi. Yang kedua, ikan tuna hampir 4 kali lipat, jadi 400%. Ketiga, ikan tuna madidihang 3 kali lipat atau 300%, dikenakan produktivitasnya dan HPI sekaligus berdampak sangat signifikan terhadap pungutan hasil perikanan per Gross Tonnase-nya. Misalnya untuk kapal pancing 100GT nilai pungutan hasil perikanan *enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima ribu* atau *enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh* per GT, sebelumnya itu 120 juta atau *satu juta dua ratus* per GT, naik 5,84 kali lipat atau 583% bahkan jika menggunakan tarif PHP

berdasarkan PP Nomor 19/2006 nilai PHP kapal pancing cumi melonjak luar biasa 58 kali lipat atau 5829%.

Untuk kapal dengan Alat tangkap rawai tuna *long-line* misalnya diatas 60 GT tarif PHP sebelumnya 1.192.688 per GT naik menjadi 4.026.537 meningkat 3,38 kali lipat atau 338%. Hal tersebut bisa jadi berdampak pada penurunan Alat tangkap rawai tuna yang relatif ramah lingkungan. Besarnya pungutan hasil perikanan akan berdampak pada segmentasi pelaku usaha perikanan dimana yang memiliki modal besar saja yang bisa masuk ke industri ini, sementara pelaku usaha kecil yang ada di daerah akan semakin terancam.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Cukup Bu?

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Dua lagi, Pak Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Saya rasa esensinya, esensinya kami udah bisa menangkap Bu ya.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Iya, terakhir soal Lumbung Ikan Nasional lah.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO)

Iya, terakhir ya Bu.

Terima kasih.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Iya, saya beri catatan lagi, Pak Menteri mohon maaf sekali lagi soal Lumbung Ikan Nasional ini sebagaimana rapat kita beberapa waktu kemarin mohon maaf Pak Menteri atas penyampaian kami yang mungkin juga adalah sebuah reaksi terhadap bagaimana suara konstitusi kita untuk memperjuangkan adanya perhatian negara Pak Ketua terhadap daerah dan terutama kami di Maluku.

Di pembahasan anggaran kita 2023 Pak Menteri ini saya tidak menemukan ada nomenklatur untuk Lumbung Ikan Nasional Pak Zaini, padahal kemarin di akhir *statement* saya saya bahkan memohon sekali. Kali ini sudah tidak memohon lagi Pak Menteri saya mendesak untuk dialokasikan anggaran untuk Lumbung Ikan Nasional.

Saya membaca jawaban bersama yang sampaikan oleh Sekjen bersama dengan para Dirjen rapat minggu kemarin di Komisi IV, saya tidak

mengikutinya disini bahwa ada skema untuk pembahasan, untuk pembangunan MLIN ini khususnya pembangunan *Ambon New Port* yang terintegrasi dengan MLIN ini sebagai bentuk skema kerja sama Pemerintah-Badan Usaha. Saya minta penjelasan terkait perkembangan skema KPBU-nya Pak Sekjen, sekaligus di mana intervensi dari anggaran 2023 ini untuk pembangunan *Ambon New Port* itu. Kalau benar ada skema pembangunan dengan dunia usaha, harusnya kita minta ada bagian dari APBN-nya. Kami harapkan mudah-mudahan suara kita di sini pada rapat hari ini dan rapat-rapat kemarin bisa didengar oleh Presiden dan juga oleh Menteri Keuangan agar anggaran KKP ditambah dan di dalamnya juga ada dimasukkan strategi untuk pembangunan Lumbung Ikan Nasional.

Ini terakhir mungkin Pak Budi bahwa besok lahirnya Pancasila ya Pak Menteri, kita tidak ingin kemudian ini menjadi satu preseden buruk bahwa kita tidak kemudian mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila Pak Menteri di Sila ke-5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan segala upaya-upaya kita bisa menjawab dan kami dukung benar segala perjuangan dan apa yang disampaikan oleh Menteri KKP.

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya kembalikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih, Bu Saadiah.

Berikut Pak Edward Tanur Fraksi PKB, silakan Pak Edward. Pak Edward, ini benihnya aman Pak Edward? Ketintangnya aman juga? Oh belum. Ya lanjut, lanjut Pak.

F-PKB (EDWARD TANUR, S.H.):

Jadi, selamat siang atau selamat sore untuk kita semua.

Pimpinan Komisi IV beserta seluruh Anggota Komisi IV baik yang hadir secara virtual maupun yang fisik saya sampaikan salam hormat.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Sebentar Pak Edward. Maaf, maaf, maaf, ini kesalahan saya, saya tidak membaca. Ini sebenarnya ada beberapa Fraksi yang belum, kita persilakan Fraksi lain dulu Pak Edward.

F-PKB (EDWARD TANUR, S.H.):

Oh iya iya, tidak apa-apa, tidak masalah.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Mohon maaf. Kesalahan Pimpinan, siap salah.

Sebelum ke Pak Edward ada beberapa Fraksi yang belum kami persilakan, pertama Pak Dhevy Bijak dari Fraksi Demokrat. Setelah itu siap-siap Bu Alien Mus dari Fraksi Golkar. Maaf Pak Edward salah saya.

F-PD (MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU):

Izin, kakak Edward.

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Menteri, Pak Sekjen, beserta seluruh jajaran, kemudian selamat datang untuk Pak Dirut Utama PT Perikanan Indonesia atau Perindo yang sudah hadir, kemudian juga dari Direktur Utama PT Garam (Persero), dan seluruh yang hadir yang saya hormati dan saya banggakan,

Seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, saya pun mewakili dari Fraksi Partai Demokrat memberikan tanggapan, masukan, dan kemudian pertanyaan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Yang pertama terkait dengan RKA K/L KKP tahun 2023 ini. Komposisi anggaran untuk pembangunan Kelautan dan Perikanan terlihat belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat karena dirasa masih sangat kecil pada pagu anggarannya untuk kontribusi bagi masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sektor kelautan perikanan belum menjadi arus utama dalam arah dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Hal ini menjadi ironis mengingat sekitar 70% wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geopolitik yang sangat strategis.

Kemudian pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L tahun 2023 sebesar Rp6,104 triliun, usulan pagu anggaran KKP tahun 2023 kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2,150 T, sehingga total usulan pagu anggaran Kementerian KKP tahun 2023 menjadi sebesar Rp8,25 T. Anggaran KKP termasuk tergolong kecil di bawah 1% dari APBN. Oleh karena itu Fraksi Partai Demokrat memberikan masukan:

1. KKP agar fokus pada program-program strategis yang berdampak pada berdampak langsung pada sektor perikanan dan budidaya, sementara program kecil-kecil yang tidak perlu atau yang tidak *urgent* agar ditinjau kembali;

2. Kelautan dan Perikanan agar meningkatkan produksi sektor kelautan perikanan dan yang berkelanjutan di tahun 2023, dalam rangka penambahan PNBP ekspor dan penyediaan pangan;
3. Orientasi pemulihan ekonomi Tahun 2022 diarahkan pada program Padat Karya bukan diproyekkan;
4. Penyerapan anggaran agar terdistribusi secara maksimal sejak awal tahun sehingga sehingga transformasi perekonomian sektor Kelautan dan Perikanan semakin meningkat.

Kemudian keberhasilan kebijakan penangkapan ikan terukur sangat ditentukan oleh kesiapan teknologi dan sarana prasarana Pelabuhan Perikanan. Pada usulan, tambahan pagu anggaran tahun 2023 KKP menganggarkan sebesar Rp210 Miliar untuk 1 paket pengadaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan, mendukung penangkapan ikan terukur, dan PNBP *pasca* produksi. Oleh karena itu, kami dari Fraksi Partai Demokrat meminta diberikan penjelasan yang lebih terperinci terkait dengan hal tersebut.

Selanjutnya terkait dengan PP Nomor 27/2021 tentang Penyelenggaraan di bidang Kelautan dan Perikanan salah satunya substansi mengatur tentang asuransi nelayan dan jaminan hari tua. Pada tahun 2023, KKP menganggarkan Rp2,65 miliar kepada 15.000 orang untuk perlindungan nelayan atau asuransi mandiri dan jaminan hari tua. Fraksi Partai Demokrat meminta jelaskan seperti apa kriteria nelayan yang mendapatkan fasilitas perlindungan atau asuransi mandiri, kemudian sampai dengan saat ini seperti apa evaluasi program tersebut, dan kemudian berapa jiwa yang sudah terasuransikan.

Selanjutnya yang penting dan hampir teman-teman semua tadi menyampaikan, menurut kami kami juga merasa ini penting terkait dengan anggaran pengadaan kapal pengawas tahun 2023 sebesar Rp175 miliar dan *speed boat* sebesar sebesar Rp12 miliar. Namun demikian kami tidak melihat dari paparan Pak Menteri tadi tidak adanya bantuan pengadaan kapal ataupun ketinting untuk para nelayan, untuk itu kami mohon penjelasannya.

Selanjutnya, terkait dengan anggaran promosi produk kelautan perikanan dan untuk skala internasional sebesar Rp13,5 miliar dan promosi untuk dalam negeri sebesar Rp4,9 miliar. Mohon kami diberikan penjelasan terkait gambaran dan *output* kegiatan promosi yang dimaksud.

Selanjutnya, ini untuk Dirut PT Garam. Sampai saat ini kebutuhan garam nasional masih disokong oleh import dari luar negeri. Pada 2019 secara volume impor garam Indonesia mencapai 2,59 juta ton, aturan kandungan NaCl pada garam minimal 97% merupakan bumerang buat kita karena kadar NaCl dalam garam yang diproduksi petambak dalam negeri kurang dari 97% berada di bawah standar sehingga menjadi masalah. Akibatnya garam petambak tidak sepenuhnya dapat terserap oleh industri. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat memohon diberikan penjelasan apakah garam dengan kadar NaCl kurang dari 97% itu tidak sehat dan membahayakan, kemudian seperti apa regulasi penetapan standar kadar NaCl sebesar 97% itu, kemudian apakah mungkin jika regulasi standar NaCl pada garam dapat diturunkan menjadi

kurang dari 97%? karena di sisi lain Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan untuk memfasilitasi bantuan Pemerintah kepada petambak garam rakyat dengan teknologi terkini guna meningkatkan mutu dan kualitas agar dapat diserap oleh industri sebagai bahan baku dan bahan penolong lainnya untuk mengurangi impor garam.

Terakhir terkait dengan honor Penyuluh Perikanan Bantu (PPB). Pada tahun 2022 sebesar Rp58,41 miliar bagi 1732 penyuluh atau 2,8 juta per orang dan pada tahun 2021 sebesar 2,7 juta per orang. Pada tahun 2023 kami tidak melihat pengalokasian anggaran untuk honor penyuluh perikanan bantu pada Ditjen BPSDMKP, yang menjadi pertanyaan kami apa sudah tidak ada lagi penyuluh perikanan bantu atau seperti apa mohon kami dari Fraksi Partai Demokrat diberikan penjelasan terkait dengan ini.

Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Pimpinan.

Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Bang Dhevy Bijak dari Fraksi Demokrat.

Apakah ada dari Fraksi lagi yang masih belum?

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Kalau tidak ada lagi kita akan lanjut ke sesi pendalaman. Tapi sebelumnya Pak Menteri, para Anggota yang saya hormati, saya minta izin untuk skors 3 menit karena saya harus melaksanakan tugas yang tidak bisa diwakili. Jadi saya minta 3 menit saja saya skors sebentar, karena *nggak* ada yang menemani saya di depan sini ya. Setuju ya teman-teman ya? Rapat saya skors 3 menit.

(RAPAT DISKORS PUKUL 14.57 WIB)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik.

Kita bisa lanjutkan ya Bapak/Ibu sekalian. Skors saya cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL 15.00 WIB)

Kita lanjutkan ke sesi pendalaman.

Yang pertama Bapak Ansi Lema dari Fraksi PDI Perjuangan, silakan Pak Ansi 3 menit.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Terima kasih Pimpinan Pak Ketua Budi Djiwandono.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang, dan
Salam sejahtera buat kita semua,

Pak Menteri, Pak Sekjen, para Dirjen dan Eselon I yang saya hormati,
Pak Direktur Utama PT Perikanan Indonesia, juga
Direktur Utama PT Garam yang saya hormati,

Pak Menteri yang ingin saya sampaikan ini tentu tidak ada hal yang baru Pak Menteri, tetapi perlu saya sampaikan karena hari ini kita bicara tentang rencana 2023 nanti. Saya ingin mengutip konstitusi kita mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat ini Pasal 33.

Kali lalu saya membaca presentasi pada saat RDP, nilai tangkapan kita dari Perikanan Tangkap itu angkanya Rp224,08 triliun, saya ulangi Rp224,08 triliun. Sementara target PNBP awal waktu Pak Menteri jadi Pak Menteri bicara Rp12 triliun, waktu itu saya suka sekali Pak Menteri, tetapi saya baca kemarin targetnya Rp1,9 triliun dan yang sudah berhasil kita dapatkan dari PNBP Rp600 miliar. Pak Menteri, itu berarti dari Rp224,08 triliun yang kita sebenarnya potensi kekayaan yang kita dapat dari Perikanan Tangkap yang masuk ke kas negara cuma Rp600 miliar dan itu setara dengan 0,26%. Terus terang Pak Menteri, kalau merujuk kepada Pasal 33 yang saya sebutkan tadi, artinya bumi, air, dan kekayaan alam dalam konteks ini laut itu belum menghadirkan kesejahteraan bahkan keadilan bagi rakyat. Lalu pertanyaannya, Rp224 triliun ini lari ke mana dan siapa yang paling mendapat banyak? Bukan negara, bukan rakyat, bukan nelayan kecil dan tradisional Pak Menteri, saya mau menangis Pak Menteri. Artinya yang mendapatkan ini itu adalah korporasi-korporasi besar di sektor perikanan, apakah korporasi tidak boleh mendapatkan profit? Boleh, tetapi tolong proporsinya bukan kah negara ini didirikan untuk dua tujuan? Satu, untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, yang kedua untuk keadilan sosial. Jelas di sini keadilan sosial itu tidak nampak Pak Menteri, toh yang kita dapatkan dari sektor Perikanan Tangkap cuman 0,26%. Besok kita akan memperingati 1 Juni hari lahirnya Pancasila dan saya kira ini bukan kebetulan. Kalau hari ini kita merefleksikan sejauh mana laut kita itu memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia, sejauh mana laut kita menjadi ruang hidup dan sumber hidup.

Yang kedua Pak Menteri, saya mohon dengan sangat Pak mungkin *please* Pak Menteri soal Lumbung Ikan Nasional. Saya bukan dari Maluku, saya dari NTT, tapi kalau bicara soal *icon* pembangunan sektor maritim menurut saya ya Lumbung Ikan Nasional ini. Kenapa? Karena hari-hari ini

Presiden Jokowi tahun depan 2 tahun lagi 2024 akan turun. Saya sebagai partai pendukung PDI Perjuangan itu belum melihat *icon* kebijakan Presiden Jokowi dalam bidang sektor kelautan ini, padahal pidato kemenangan pada tahun 2014 diatas kapal Phinisi di Bandar Djakarta orientasi kita pada poros maritim dunia, jangan memunggungi lautan. Dan menurut saya Pak Menteri, harusnya menjadi program andalan dan unggulan dan menjadi *icon* Pemerintah Jokowi sebagai *legacy* itu adalah Lumbung Ikan Nasional. Kenapa Lumbung Ikan Nasional? Ya, Maluku itu 93%-nya laut, Maluku ini kalau kita buka sejarah sejak zaman kolonialisme klasik hanya sekedar di eksploitasi mulai dari eksploitasi rempah-rempah. Saya kalau baca 224 T saya berani menyimpulkan itu kekayaan Maluku yang paling banyak di eksploitasi, kenapa kita tidak kembalikan ini? jangan sampai pada zaman kolonialisme klasik ada Portugis, Spanyol, Belanda semua keruk dari Maluku rempah-rempah. Pada zaman sekarang ada neokolonialisme dalam bentuk ya mohon maaf Pak privatisasi sektor laut kita, swastanisasi sektor laut kita. Terus terang Pak menteri saya berharap saya senang waktu Pak Menteri ngomong 12 T saya senang karena sebenarnya mungkin kita mampu Pak Menteri, tinggal bagaimana tata kelolanya.

Yang berikut Pak Menteri, saya mau tanyakan kaitan dengan kebijakan penangkapan terukur Pak. Kali lalu Ibu Kiki dalam RDP itu sudah bertanya soal data zonasi dan juga sejauh mana sumbangsih dan kontribusi PNBP dalam penerapan konsep penangkapan terukur, kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih utuh.

Yang berikut Pak Dirjen Perikanan Tangkap. Pak saya baca ini ada kebijakan, bagus kebijakan judulnya Pak Kampung Budidaya Laut berdasarkan Kearifan Lokal. Kali lalu 2022 itu termasuk ada juga di NTB di Lombok Timur kampung lobster, juga di Kabupaten Kupang kampung kerapu dan beberapa tempat lain Pak Pak Dirjen, anggarannya itu di NTT *dua puluh delapan koma sekian miliar*, di NTB itu antara lain Rp13 miliar sekian. Sekarang saya baca jumlahnya itu naik drastis menjadi 215 kampung perikanan budidaya, kampung perikanan budidaya. Saya pingin tahu pada saat pelaksanaan kali lalu itu capaian prestasinya itu seperti apa, sehingga dari kali lalu kayaknya tidak sampai 10 program ini Pak tidak sampai 10. Hari ini jadinya ada 215, capaiannya tuh seperti apa? Apakah ada pemetaan potensinya? Apakah ada kajian yang komprehensif? Studi kelayakannya, dan wilayah sebarannya nih di mana, Pak. Saya kasih contoh aja saya tanya, itu di NTT Kampung kerapu di Kabupaten Kupang di Pulau Semau itu capaiannya sekarang tuh kayak gimana Pak sehingga Bapak mereka yakin bahwa ini harus diperbanyak menjadi 215. Kalau saya pukul rata 1 kampung itu Rp10 miliar karena yang kali lalu di NTT Rp28 miliar Pak, kalau Rp10 miliar saja kali 215 itu ada sekitar *dua sekian triliun*. Nah ini kira-kira akan jadi sesuatu atau tidak? *Multiplier effect*-nya seperti apa Pak?

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih, Pak Ansi.

Selanjutnya tadi Pak Edward, silakan Pak Edward.

F-PKB (EDWARD TANUR, S.H.):

Baik.

Selamat sore untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV, beserta Anggota Komisi IV baik yang hadir secara virtual maupun yang fisik, Bapak Menteri, Bapak Dirjen, beserta jajaran Eselon I dari KKP, dari PT Garam dan PT satu itu PT apa lagi tuh sudah lupa,

Jadi begini, saya tetap memberikan apresiasi kepada Kementerian KKP karena dari tahun lalu itu hasil pencapaian penyerapan dana itu 98% itu tidak salah ya, itu tertinggi saya pikir itu tertinggi. Cuma setelah kita melihat dalam usulan anggaran tahun ini kok hanya diberi dananya hanya 6,1 aja malah turun ini usulannya, tapi syukurlah karena ada usulan tambahan susulan ini jadi *delapan koma* ya. Memang kita omong PNBPN ini Pendapatan Bukan Pajak ini memang tergantung sangat tergantung pada porsi kegiatan, kalau ke sama kita bisnis kalau modalnya kurang ya untungnya juga kurang, mau gimana ini biar kita pakai ahli dari Amerika juga sama, malah defisit lagi nanti. Karena ini negara ini bukan cari untung, tapi menghidupi mensejahterakan rakyat, itu yang penting tujuan, jadi saya memahami ini.

Memang dulu awal-awal saya bingung dan saya sering emosi, tapi sekarang saya sudah sadar. Saya bilang memang manusia ini ada kelemahan dan ada kelebihan, kelebihannya kita kasih apresiasi, kelemahannya kita kasih masukan supaya dia perbaiki. Tadi Pak Menteri cerita tentang Norway, saya bilang Norwegia itu dia sudah merdeka dan dia sudah negara maju, kita ini negara baru mau maju jadi kita boleh meniru tapi ukur kekuatan, nafsu besar tapi kena agar harus ukur juga.

Jadi seperti yang sekarang kita lihat banyak potensi saya saya tidak mau bicara tentang angka-angka karena angka-angka itu hanya suatu penegasan, tapi yang saya bicara kebijakan makro, pandangan cara kita memandang ke depan itu bagaimana yang saya bicarakan, ya bergaya pemimpin sedikitlah. Jadi memang memang negara Republik ini memang saya duduk-duduk saya merenung, saya dengar teman-teman bicara, saya juga prihatin. Memang bahasa yang saya sampaiin sederhana, tapi coba direnungkan baik-baik bahwa mengurus negara ini tidak gampang. Dulu saya anggap gampang saja, pegang duit banyak ngurusnya gampang. Jangan dipikir pegang uang banyak bocornya juga banyak, jadi yang mencapai sasaran itu mungkin 10 yang capek 8 atau 7 tapi kita tetap memberikan apresiasi pada Pak Menteri beserta jajarannya.

Saya mengambil contoh seperti bioflok, awalnya saya tentang itu bioflok. Tapi setelah saya pelajari, setelah pelatihan, saya merasa wah ternyata boleh juga ini untuk daerah-daerah pegunungan pedalaman boleh nih dan hasilnya sudah dirasakan. Cuma saya titip pesan untuk Dirjen Budidaya Ikan Air Tawar

ini, tolong, karena setelah bioflok ini banyak diadakan nanti akan ada bencana bibitnya Pak TB bibitnya ini yang sekarang karena yang lalu-lalu itu udah dipanen, beli bibit saja tidak mampu. Waduh, ini kelompok ini saya bilang ini prihatin betul-betul, memang mereka bukan pengusaha, mereka ini dipaksakan untuk pelihara ini ikan, habis makan dia habis juga. Nah jadi ini kita mau bina ini masyarakat untuk berwirausaha atau mau membina dia untuk kuat makan supaya jangan *stunting*. Menurut saya dua dua harus berjalan, makan juga, siap untuk pelihara lagi.

Jadi satu lagi mengenai Pak Zaini, saya mohon maaf, ini kapal kita saya sudah omong ulang-ulang sebenarnya saya juga sudah bosan. Cuma saya harus omong ulang lagi saya bicara ulang lagi mengenai tahun depan itu pengadaan kapal tangkap itu kalau boleh karena daerah-daerah Indonesia Bagian Timur itu kebanyakan nelayannya banyak yang masih miskin dan nelayan pesisir. Tolong lah, kalau bisa pengadaan ketinting saja, karena kita kita jangan diadakan kapal besar-besar, modal untuk melaut saja tidak ada, bagaimana dia mau beli solar, bagaimana dia menyiapkan es batu. Terakhir dia bukan untung, buntung nanti kapalnya di sandar di pesisir dan dia kabur pindah kerja yang lain, jadi ini kita evaluasi dan kita pelajari secara baik. Ini masukan dari suara hati dan saya sudah bosan omong berulang-ulang minta maaf sebelumnya saya minta maaf karena ini kalau kita omong ulang-ulang orang juga dengar bosan yang omong juga lebih bosan lagi. Jadi ini yang mengenai kapal penangkap ikan, ya bisa dikembangkan lagi kalau seandainya kita mendapat dana yang besar kita bisa kita kembangkan misalnya rumput laut. Banyak potensi yang ada di di luar-luar pulau yang belum tersentuh, ini yang harus kita memberikan perhatian khusus kepada mereka, mereka ini ya kebanyakan masyarakat itu penghasilannya rendah rendah sekali, bukan rendah lagi rendah sekali.

Jadi tolonglah program-program itu evaluasi yang benar, jangan kita main asal hantam saja hantam saja DPR RI ini adalah mata, telinga, mulut, hatinya masyarakat. Kami ini sering turun malah reses itu berbulan-bulan, 1 bulan 1 bulan lebih, jadi kami pelajari secara baik. Ya kami tidak bisa seenaknya mau menekan ke Kementerian, kita diskusi, kita cari solusi semuanya tujuannya bagaimana supaya masyarakat Indonesia ini adil, makmur, dan sejahtera yang tak bisa kemarin ada omong-omong Pancasila itu sudah disebut ya sudah Pancasila tidak usah diomong lagi itu semua otak semua yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cuma dalam prakteknya masih sering terjadi kekurangan di sana sini.

Mengenai PNBK kita tetap memberikan apresiasi kepada Bapak Menteri beserta jajarannya, semoga nanti di akhir tahun Pak Jokowi ini udah bisa capai Rp12 miliar eh Rp12 triliun, kalau kalau berat ya mendekati, dekat-dekat sedikit lah jangan sampai terlalu jauh dari situ. Ini yang kami harapkan.

Akhir kata saya hanya sampaikan ucapan selamat berjuang, tetap semangat, jangan pernah menyerah karena walaupun apa yang terjadi tetap kita tetap bersatu NKRI.

Terima kasih.

Selamat sore.
Merdeka!

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih, Pak Edward Tanur.

Kita lanjutkan pendalaman.

Pak Andi Akmal, ada Pak Andi? Pak Andi silakan Pak Andi.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Pak Menteri beserta jajaran,
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,

Yang pertama masalah anggaran saya sepakat teman-teman bahwa kita mendukung Pak ya sebenarnya bukan Rp8 triliun kebutuhannya Rp11 triliun sebenarnya. Jadi sebenarnya kebutuhannya pas itu Pak karena 2014 kemarin anggaran KKP itu mencapai Rp12 triliun, nah ini kita memang sangat berharap. Kalau secara politik saya kira semua fraksi mendukung Pak Menteri di sini, tinggal Pak Menteri bisa komunikasi dengan Presiden, Menteri Keuangan. Artinya ini bisa ditambah bukan Rp8 triliun tapi Rp11 triliun Pak kalau bisa, ya kalau Bapak minta 8 nanti dikasihnya Rp7 triliun ya jadi mungkin mintanya agak besar, itu yang pertama. Karena kalau kita lihat kinerja, saya kira kita berikan apresiasi Pak kinerja bahwa dari ekspor maupun dari kinerja pencapaian apa namanya programnya itu yang pertama.

Yang kedua, tahun 2023 Pak Menteri ini kan sudah tahun mendekati Pemilu nih. Artinya bahwa keberadaan kita ini Anggota Dewan ini tentu ingin dirasakan oleh masyarakat nelayan di daerah kita masing-masing Pak, karena itu kita untuk mendukung program-program yang yang apa namanya yang pro terhadap nelayan tradisional kecil tapi banyak Pak Menteri saya selalu mengatakan seperti itu Pak ya, jadi *nggak* apa-apa dipikir kecil tapi penerimaannya banyak. Saya tadi melihat di Dirjen Budidaya, saya kira sudah cukup bagus Pak ya programnya, tapi angka untuk rumput laut Pak. Kami di Sulsel ini Pak Menteri ekspor terbesar adalah rumput laut, ini anggaran Bapak ini cuma *dua koma delapan* cuma *dua delapan* cuma 2 miliar Pak cuma Rp2,6 miliar, gimana kita mau bantu ini para apa para petani rumput laut kita ini kalau anggaran sangat kecil sekali. Mungkin Pak Dirjen nanti bisa di ini ya ini masukan para Dirjen, dikurangi sedikit mungkin anggaran untuk udang Pak. Udang ini kan pengusaha sebenarnya ini, artinya sebagian lah di apa diberikan apakah talinya maupun benihnya kepada petani rumput laut, itu yang pertama. Termasuk juga sebenarnya kapal-kapal kecil Pak Dirjen Perikanan Tangkap ya itu sangat dibutuhkan Pak.

Kemudian Pak Menteri, ada hal juga yang perlu diperhatikan. Saya lihat tadi ada anggaran untuk rumah, rumah ikan atau kalau di daerah kami namanya rumpon, Pak. Rumpon ini sebenarnya kita tahu bahwa rumpon ini tempatnya ikan berkumpul ya, jadi sebenarnya program ini sangat bagus Pak. Bahkan di Sulsel itu ada Bupati namanya Bupati Bulukumba itu dia targetkan Pak 1.000 rumpon di daerahnya, nah kita lihat ini di sini anggarannya Bapak rumpon cuma Rp10 miliar eh cuma Rp3 miliar nih Pak, bayangkan cuma Rp3 miliar loh. Saya aja minta ini *nggak* cukup ini Pak Menteri ini Rp3 miliar satu rumpon Rp300 juta Pak, sementara sebenarnya rumpon komunal ini bisa kita perbanyak sehingga nelayan-nelayan kita tuh bisa datang ke sana untuk menangkap ikan Pak terutama untuk ikan apa namanya Tuna ya Pak ya. Pak Menteri jadi saya berharap juga nanti di Perikanan Tangkap ini Pak Dirjen bisa ditambah anggaran untuk rumpon Pak, rumpon ini sangat penting ya.

Yang terakhir Pak Menteri saya ada aspirasi dari masyarakat Pak di Dapil saya di Bone, adanya upaya dari Telkom Pak. Telkom ini katanya mau apa kabel bawah laut, sekarang ini mereka ingin menggusur rumponnya nelayan Pak, ini ada berapa rumpon yang akan digusur akan dimusnahkan sebenarnya *nggak* ada masalah dimusnahkan tapi penggantinya sesuai dengan nilai rumponnya Pak. Ya, saya sekarang asosiasi nelayan di daerah siapa ini berkumpul mereka dan meminta disampaikan kepada Pak Menteri dan jajarannya, agar siapapun Pak ya yang ingin apa namanya menggeser ataupun ingin merusak rumpon ini tentu kita lawan Pak. Kalaupun ini dicari solusinya gimana *nggak* dirugikan daripada nelayan kita ini Pak Menteri ya, jadi tolong ini Pak Menteri ini bisa di atensinya ini di daerah Kabupaten Bone di Teluk Bone ini apakah itu memang benar. Tapi sekarang timnya sudah datang ke ke masyarakat Pak hanya dibantu sekedarnya, rumponnya dimusnahkan kemudian sekejanya mungkin ada Dirjen apa Ruang Laut Pak ya PRL ini bisa dikomunikasikan Pak. Tidak ada masalah rumpon itu dipindahkan Pak, tapi diganti dengan selayaknya Pak atau dibuatkan rumpon baru sehingga tidak merugikan daripada nelayan kecil kita.

Saya kita demikian aja, Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Andi Akmal Pasluddin.

Berikut Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Baik.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Ketua.

Rekan-rekan Anggota Dewan dan Pak Menteri, beserta jajaran yang saya hormati,

Tema kita hari ini adalah untuk membuat RKP tahun 2023. Temanya yang diangkat juga sangat menarik bagaimana kemudian peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif. Artinya kan ini akan memberi ruang untuk masyarakat kita, ekonomi ini akan berbicara tentang keadilan, ekonominya juga akan berbicara tentang kesejahteraan, serta mempersempit jurang kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, sehingga bagaimana kemudian semangat ini nanti kita akan lihat di program-program di 2023. Sementara kalau kemudian kita kaitkan dengan beberapa capaian-capaian dan janji-janji dari Pak Menteri ini tentunya kemudian harus menjadi apa catatan bagi kita semuanya terutama dari ketika Pak Menteri menjabat yang dijanjikan di depan kita semuanya adalah bagaimana kemudian pencapaian PNBP.

Nah, dari PNBP ini tentunya akan kita korelasikan kepada naiknya anggaran dari apa dari KKP. Saya juga sepakat harusnya tidak *delapan* kalau kemudian memang keyakinan kita bahwa PNBP bisa dicapai di apa yang sudah dijanjikan itu, harusnya memang kita yakin kita ya berani meminta karena memang BNPB yang dicapai tinggi. Itu juga kita kaitkan dengan bagaimana apa nilai NTN yang menurut saya dengan PNBP yang dibanggakan oleh KKP lah untuk seperti itu, pergerakannya juga tidak signifikan ya jadi.

Sementara kalau saya melihat mudah-mudahan ini hanya di Dapil saya saja, bagaimana kemudian Pemerintah hari ini hadir dalam program-programnya. Harusnya kan kita memberikan apa hadir negara hadir untuk kemudian bisa mensejahterakan masyarakatnya, dalam hal ini KKP adalah bagaimana kemudian nelayan-nelayan kecil kita terutama nelayan-nelayan rakyat kita bisa berkembang. Fakta di lapangan kehidupan mereka juga tidak banyak bergerak, masih dalam kesusahan dan kesulitan secara ekonomi maupun apa proyek-proyek ekonomi yang lain sehingga ini menjadi catatan kita sehingga bagaimana kemudian program-program tadi betul-betul berpihak kepada para nelayan yang ada di kita. Kita tidak ingin kemudian program-program itu juga hanya sifatnya *Hit and Run* saja ya, sederhananya misalnya bukan program yang jelek tapi bagaimana kemudian di kaji.

Banyak catatan kita misalnya program bantuan tentang apa ikan dan pakannya. Sampai hari ini terus terang di Dapil saya juga 2 tahun belum pernah ada pakan apa pakannya datang, tetapi kita mendengar mendengarkan informasi bahwa pakannya juga kalau bahasa orang perikanan dan peternakan ini pakannya pakan BS pakan yang memang tidak berkualitas. Saya kemarin sampaikan kalau memang betul datang, saya minta sampelnya akan saya bawa ke Lab. Artinya Pak mungkin perlu dikaji apakah kemudian tidak kemudian memberikan pelatihan yang memang bisa memandirikan mereka, bisa membuat pakan mereka, ajari mereka membuat pakan yang lebih apa

lebih berkualitas tanpa harus kemudian terus mengandalkan bantuan dari Pemerintah karena dengan berbagai keterbatasan. Makanya bantuan-bantuan yang sifatnya *skill* ini saya pikirkan menjadi penting supaya nanti lebih bisa bertahan, bisa mengembangkan diri, karena kalau mengandalkan bantuan dengan kuantitas bantuan yang tidak seberapa rasa-rasanya untuk kemudian mengangkat derajat dari nelayan kita menjadi sejahtera hanya mimpi saja dari ini.

Nah saya juga kaitkan dengan bagaimana apa angka *stunting*, walaupun ini bukan program khusus dari KKP, tetapi paling tidak bagaimana peran KKP kemudian untuk mengentaskan *stunting* ini angka apa konsumsi ikan di kita kan masih rendah. Nah bagaimana program-program ke arah sana itu justru tidak dikurangi, tetapi harus ditambah. Program Gemarikan awalnya ya ini catatan kita, tahun ini yang sebelumnya 1000 jadi 500 dapat di terungkap di rapat balik ke 1000, 1000 itu dari sisi pakatnya Pak, tapi dari sisi jumlah per pakatnya jauh juga dikurangi dari tahun sebelumnya. Bagaimana kemudian kita bisa mengangkat masalah *stunting* ini kalau kemudian kampanye-kampanye yang sebenarnya memberikan manfaat untuk terkait dengan apa masalah *stunting* juga dikurangi secara kuantitasnya, jadi dengan berbagai.

Nah ini sisi-sisi lain jangan sampai kemudian program-program ini arahnya kemudian berpihak kepada nelayan yang sifatnya korporasi, tetapi nelayan yang nelayan-nelayan rakyat kita sangat-sangat apa tidak diperhatikan. Termasuk diskusi diskusi di internal kita ya bagaimana apa kapal yang 5 GT juga terus dikurangi, nah ini nanti kita akan lihat ini dengan kemudian ada minta pemotongan-pemotongan baru apakah program-program yang terkait dengan nelayan-nelayan kita justru yang dipotong sementara program-program yang lain yang tidak terkait langsung dengan nelayan kita itu tidak mendapatkan potongan yang signifikan. Saya pikir ini perlu menjadi catatan untuk kemudian menjadi program nanti di apa 2023.

Itu mungkin Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Slamet.

Tadi maaf saya terlewat. Bu sudah balik, Bu Alien Mus. Silakan Bu.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom.

Yang saya hormati Pimpinan, Bapak Ibu Anggota Komisi IV,
Pak Menteri beserta Pak Sekjen, dan jajarannya,

Untuk Pak Menteri mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Langsung saja karena tadi sudah banyak yang menyinggung tentang PNBP dan penangkapan terukur, terus juga tentang budidaya bioflok, dan juga rumput laut. Sebelum saya ke Dirjen Tangkap, saya mau ke Budidaya dulu, karena memang tadi yang di singgung oleh Pak Andi Akmal bahwa selain dari penangkapan terukur atau PNBP yang bisa didapatkan dari hasil tangkap perikanan, memang rumput laut juga ini sangat menjadi satu andalan bagi para nelayan. Tolong kalau bisa KKP memiliki prioritas anggaran yang benar-bener dengan anggaran yang kecil ini punya fokus penganggaran yang tepat sehingga para nelayan itu bisa mendapatkan dampak dan manfaatnya.

Kemudian Pak Sekjen terima kasih banyak atas jawaban yang tertulis, saya merasa bahwa jawaban-jawaban ini masih sekedar realita apa cuma di atas kertas saja, tapi setidaknya sudah dijelaskan melalui peraturan dan semua yang sudah kita ketahui bersama.

Saya ingin menyampaikan tentang jamur atau *ice-ice* yang terdapat di rumput laut ya, *ice-ice* ya. Jadi ini memang ada beberapa Provinsi termasuk Sulawesi Selatan kami turun kemarin di Provinsi, Provinsi Banten, terus kami turun juga di Sulawesi Tengah, kita juga di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, kita melihat memang ini ada jamur yang ada di rumput laut ini. Mungkin saja kita harus berikan atensi, perhatian atau pemberitahuan sejak awal bahwa mereka kalau mau melakukan budidaya rumput laut di perairan yang seperti ini tidak akan berhasil dan mendapatkan masalah sehingga nelayan itu tidak capek-capek membeli benih dan juga melakukan budidaya rumput laut tersebut. Ini saya pikir *nggak* ada pemahamannya Pak, sosialisasi ini penting. Kemudian selain itu mereka juga membutuhkan alat transportasi seperti untuk mengikat rumput laut benih rumput laut di perairan itu memakai tali itu mereka membutuhkan pelampung, tali, dan juga kalau benih sudah pasti, seperti Ketinting untuk mereka karena ini kecil, mereka bisa melalui aliran air laut yang di sekitar tersebut.

Kemudian Pak Zaini saya sangat kecewa sekali sama Pak Zaini. Saya ingin sampaikan ke Pak Menteri, jangan ketawa Pak Menteri karena Mbak Ibu Puan Maharani turun di Provinsi Maluku Utara menjanjikan pemberian kapal sampai ini pembelian kapal dan juga Alat tangkap belum terealisasi. *Alhamdulillah* Ketua Komisi saya juga kemarin ke Provinsi Maluku Utara Morotai juga *Alhamdulillah* barang tak sampai-sampai. Kemarin saya telepon ke Pak Zaini, Pak Zaini lagi di luar negeri, kapan nih bisa disampaikan? Karena saya selalu membela Pak Zaini ini di depan Komisi IV dan juga Pak Ketua, tapi kali ini saya *nggak* ada lagi pembelaan buat Bapak. Karena ini daerah saya Pak, udah Pak Menteri turun di sana, Pak Menteri juga turun, udah Ibu Ketua

DPR turun, udah Pimpinan Komisi saya Ketuanya juga turun alhamdulillah tidak terealisasi dan itu memang benar-benar sungguh sangat bukan mengecewakan, diapresiasi.

Jadi Pak Dirjen Tangkap yang saya hormati karena tahun 2022 ini sudah diberlakukan PP 85 untuk Penangkapan Terukur saya mohon dengan sangat karena kalau *nggak* salah waktu kami Raker kemarin Pak Menteri menyampaikan bahwa ada zonasi. Dari zonasi per daerah tersebut per Provinsi yang sudah disampaikan juga ke kita bahwa Lumbung Ikan Nasional itu termasuk dari Penangkapan Terukur ini juga bisa menjadi atensi bagi wilayah-wilayah yang memiliki penangkapan ikan terbanyak. Kalau memang seperti ini, Penangkapan Terukur sudah berapa persen dari PP 85 dan di zona-zona mana saja sehingga kita mengetahui daerah-daerah mana saja yang benar-benar menghasilkan tangkapan ikan terbesar. Seperti kami di Maluku, Maluku Utara selalu berbicara tentang Lumbung Ikan Nasional, jangan sampai ikan yang kita punya yang kita gaung-gaungkan banyak padahal tidak terdaftar hasil tangkapannya di daerah kita.

Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Andi Akmal tadi tentang rumpon tapi rumpon juga banyak yang merugikan untuk nelayan kecil Pak Andi dan ini harus dikawal oleh PRL. Kenapa demikian? Karena bukan nelayan-nelayan kecil itu aja yang akan menangkap ikan di situ, saya yakin dan percaya kapal-kapal yang besar akan datang untuk menangkap dan ambil ikan di situ bukan hanya yang aku *nggak* tahu nih *sizing*, *sizing* ikannya sekarang berapa berapa sentimeter bagi beberapa jenis ikan tersebut kita belum tahu nih, mungkin saya juga kurang tahu atau saya tidak tanya di Panja ini yang sedetail-detailnya. Jadi ada yang kita harus pikirkan juga selain meningkatkan Nilai Tukar Nelayan yang tadi disampaikan sampai sekarang masih kecil.

Pak Menteri kita harapkan kalau seandainya anggaran KKP ini bertambah saya berdoa 1000 kali setiap kali sujud berdoa mudah-mudahan untuk KKP bertambah, ya kalau bisa Rp11 triliun lah. Tapi tapi lagi-lagi saya ingin menanyakan KKP ini untuk *Automatic Adjustment* 2022 ini berapa? Dan saya ingin menanyakan ke KKP bagaimana tentang aspirasi Pimpinan dan Anggota. Saya sekarang harus *to the point*, karena begini, apa yang kita sepakati di lapangan tidak sesuai dengan kenyataan. Jangan-jangan juga KKP seperti ini, saya harapkan janganlah.

Terus ada Dirut Perindo di sini? Ada? Eh Perinus, Perindo udah sekarang Perindo dibawahnya Perinus. Saya ingin Bapak menjelaskan kepada kami tentang raut marut yang ada di lokasi yang Bapak tanggung jawab di Jakarta ini tentang pelabuhannya carut-marutnya ini aduh saya juga bingung ini. Kemarin kita pergi ke sana sama PSDKP, oh iya. Pak Dirjen PSDKP saya ingin bertanya nih jumlah eh hari layar Bapak tinggal berapa hari? 40 hari itu, 1 bulan plus 10 hari ya? Terus kita masih punya berapa bulan lagi untuk selesai? Anggarannya bagaimana? Dan saya melihat hasil audit BPK juga ada temuan tuh di perikanan. Nah ini jadi atensi juga, lumayan tuh 30 miliar hampir 32 miliar kalau *nggak* salah, tapi nanti kita bahas deh Pak Menteri kayaknya nanti kita bahas di RDP.

Tolong diperjelas ya Pak Dirut karena Bapak ini udah menangani juga sama Perinus *management* dua perusahaan tersebut saya pikir Bapak sudah harus tahu tuh masalah-masalahnya karena kemarin kita pergi kan Bapak tahu sendiri kan, sampai ini kayaknya *nggak* ada *action* tuh. Kebetulan Ketua saya baru masuk nih.

Untuk MIAMARI Pak Menteri, Pak Menteri sudah ke Morotai kemarin, itu pembangunannya mangkrak *ndak* ada yang bisa gunakan itu, itu mau diapain Pak? Kalau *nggak* salah itu Rp520 triliun bagi dua sama yang di Jawa Tengah, eh.

KETUA RAPAT:

Rp522 miliar, bukan triliun.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Iya *sorry* Rp522 miliar bagi dua dengan yang di Jawa Tengah di mana Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Banjarnegara eh di Pangandaran, Jawa Barat.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Waduh, kalau seandainya Rp200 miliar itu masuk di Morotai bukan hanya pembangunan itu, saya pikir perikanan yang ada di sana sungguh sangat luar biasa. Kemudian Pak Menteri dari Pulau Morotai sudah melakukan ekspor ikan, tapi *barcode*-nya diganti di Vietnam baru masuk di Amerika. Saya berharap Pak Menteri dengan *lobbying-lobbying* dengan luar negeri yang begitu luar biasa, bisalah produk ikan kita ini sampai negara tujuan itu memang tidak ada transit. Kenapa sih Vietnam harus diakui produknya sementara kita *nggak*, ada apa sih? Ini yang menjadi pertanyaan besar buat kami.

Untuk nelayan-nelayan kecil memang ada beberapa daerah membutuhkan ketinting, tapi tidak semua daerah membutuhkan ketinting. Ada daerah-daerah tertentu tidak bisa dilalui untuk menangkap ikan dengan kapal kecil karena memang ombaknya hampir 22 meter sampai 3 meter itu termasuk di wilayah-wilayah kepulauan.

Dan itu saja karena Ketua saya menatap saya udah harus berhenti. Saya berharap Pak Zaini saya tunggu 2 kali Jumat kata Bapak mau menyampaikan ke saya, kalau 3 kali Jumat harus penyerahan, tapi udah 3 kali Jumat saya belum dapat kabar dari Bapak.

Terima kasih.

Itu saja yang bisa saya sampaikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

INTERUPSI F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan, satu menit.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Mau melanjutkan?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Iya mumpung nyambung nih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Nyambung, silakan Bu Kiki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Iya. Ini terkait yang mangkrak Pak, yang mangkrak ini berapa kali kan kita minta di *break down* Pak ya. Salah satu yang saya bingung Pak Menteri mohon dengan segala rasa hormat saya pengen tahu logika berpikirnya, *broodstock* Musi Rawas Dharmas itu duluan tapi *nggak* selesai-selesai. Tiba-tiba muncul lokus baru, logikanya selesaikan dulu yang mangkrak anggaran ini baru muncul lokus baru, iya kan, logika berpikirnya Bapak kan paham lah bagaimana itu. Nah lokus baru ini *urgency*-nya apa? Nah jadi penting juga. Kalau memang sekiranya saya rasa *nggak* gede lagi itu pak itu *broodstock* itu, kalau memang itu bila perlu Bapak lagi *loan*, *loan*-kan aja juga itu kalau *nggak* selesai-selesai juga karena ini terkait Perikanan Budidaya gitu.

Jadi saya mohon ini menjadi catatan buat kita semua, ini forum terbuka di Youtube ada iya kan. Logika berpikir yang mangkrak itu prioritas untuk diselesaikan Pak TB, jangan munculkan yang baru, logikanya begitu. Yang baru anggarannya kalau *nggak* salah lebih gede lagi daripada yang mangkrak, bingung saya.

Terima kasih Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Bu Kiki.

Tadi peringatan keras ya bagi Pak Zaini ya, tadi ada kader Golkar ngamuk karena Bu Puan datang tidak melihat ya bantuan program yang harusnya sudah dijalankan dan sudah dijanjikan berkali-kali ya.

Terima kasih teman-teman ya, saya rasa banyak sekali yang harus ditindaklanjuti, tadi saya cuma mau menambahkan sedikit saja karena banyak yang berbicara mengenai Penangkapan Ikan Terukur. Ya apa yang kami

pelajari Pak Menteri, teman-teman sekalian ya saya waktu itu menyempatkan diri untuk bertemu Pak Menteri dan melihat studi kasus atau *case study* di Norwegia salah satu negara yang secara sukses telah menerapkan ya kebijakan ikan terukur berbasis kuota. Memang awalnya tidak mudah, tidak gampang, tetap sekarang sektor Kelautan dan Perikanan harus mungkin penyumbang kedua terbesar untuk perekonomian Norwegia dan saya rasa dengan perencanaan yang baik dan tepat ini bisa dilaksanakan juga di Indonesia.

Catatan kami tadi mungkin melanjutkan beberapa masukan teman-teman mengenai pentingnya nanti data yang akan menjadi acuan untuk menjalankan program penangkapan ikan terukur dan juga pengawasan. Saya rasa ini nanti SDKP ini mempunyai peran penting, karena implementasi kesuksesan pengawasan perangkat atau pengawasan ikan terukur ini nanti juga akan terlihat bagaimana kita mampu mengawasi ya perangkat penangkapan ikan. Saya rasa sama juga dengan teman-teman tadi sebenarnya saya agak sedikit sedikit kecewa Pak Menteri, ini kenapa penambahannya cuma Rp2 triliun sama tadi harusnya aduh anggaran tambahannya jangan cuma 8, kita dorong 11 12 triliun tapi kita mengertilah mungkin kita mau bertahap tidak mudah, mari kita buktikan. Tapi saya ingin menambahkan ya permasalahan untuk pengawasan ini akan menjadi sangat penting ya.

Kita waktu itu juga beberapa waktu lalu Dirjen PDSKP kami bersama-sama ke beberapa titik salah satunya di Kalimantan Timur yang ya menjadi destinasi Ibukota Negara dan saya rasa kelengkapan untuk pengawasannya sangat-sangat minim. Bila kita mau bersama-sama mensukseskan ya rencana program penangkapan ikan terukur ini, maka saya himbau Pak Menteri kita juga akan dorong pengawasan yang lebih kuat lagi.

Saya rasa demikian sedikit tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Ketua ada yang ingin disampaikan lagi?

KETUA RAPAT:

Ya, saya akan lanjutkan. Tolong tampilkan lagi tadi Dirut Perindo belum ada, yang tadi ditampilkan foto-foto tadi mengenai sampah dan yang lain-lain itu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Dirut ini ngomong-ngomong kok bisa terlambat, lama sekali dari mana Pak Dirut bisa dijelaskan ke teman-teman Pak?

DIRUT PERINDO (SIGIT MUHARTONO):

Izin Pak. Siap, salah Pak. Jadi kami punya PIC, Pak PIC-nya yang biasanya berhubungan dengan DPR Pak, kebetulan PIC-nya, PIC kita *resign* Pak, kira-kira udah *resign*. Nah undangan, memang kami sudah kasih ke PIC

yang baru Pak undangan masuknya ke PIC yang lama itu aja Pak, jadi itu *nggak* diteruskan kepada kami.

Izin Pak, mohon maaf.

KETUA RAPAT:

Videonya mana tadi. Nah, jadi supaya ini saya tanya ini tanggung jawab siapa, Perindo apa Dirjen Tangkap? Apakah UPT di sana ini? Supaya jelas. Pakai *speaker* jawabnya.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP KKP (DR. IR. MUHAMMAD ZAINI, M.M.):

Kalau pengelola kawasan, karena kawasan milik Perindo, Perindo Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi termasuk sampah ini Perindo yang tanggung jawab?

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP KKP (DR. IR. MUHAMMAD ZAINI, M.M.):

Iya Pak.

KETUA RAPAT:

Bukan tambat labuh yang tanggung jawab KUPT?

DIRUT PERINDO (SIGIT MUHARTONO):

Izin Pak. Iya, betul Pak.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP KKP (DR. IR. MUHAMMAD ZAINI, M.M.):

Tambat labuh baru tahun ini Pak kita ambil alih.

KETUA RAPAT:

Ini barusan ini barusan di video tadi pagi, ini kondisinya loh. Jadi jangan jangan yang lalu-lalu. Ini tadi, coba kasih suara.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP KKP (DR. IR. MUHAMMAD ZAINI, M.M.):

Izin Pak Ketua.

Hari ini hari.

KETUA RAPAT:

Dengar dulu saya *ngomong*.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP KKP (DR. IR. MUHAMMAD ZAINI, M.M.):

Baik Pak.

KETUA RAPAT:

Ulangin lagi, ulangin lagi suaranya yang jelas. Ini Dirut kan 3 hari lalu, jadi jangan buang tanggung jawab. Saya ingin jelas yang tanggung jawab siapa ini? Silakan dijawab dulu, Zaini.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP KKP (DR. IR. MUHAMMAD ZAINI, M.M.):

Izin Pak.

Hari ini kami sudah melakukan pembersihan dengan bekerjasama semua pihak yang ada di sana, Pak. Kami juga sudah dikirim foto-foto yang dilakukan pada hari ini Pak, Selasa tanggal 31 Mei. Kami akan ambil tanggung jawab itu Pak.

KETUA RAPAT:

Bukan ambil tanggung jawab. Tanggung jawab siapa? Pertanyaannya satu-satu saya, yang saya tanyakan dijawab dulu. Tanggung jawab siapa? Oke, tanggung jawab KUPT. KUPT di bawah siapa? Di bawah saya.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP KKP (DR. IR. MUHAMMAD ZAINI, M.M.):

UPT Pak.

KETUA RAPAT:

UPT.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP KKP (DR. IR. MUHAMMAD ZAINI, M.M.):

Iya.

KETUA RAPAT:

UPT di bawah anda kan?

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP KKP (DR. IR. MUHAMMAD ZAINI, M.M.):

Siap Pak.

KETUA RAPAT:

Oke.

Yang kedua, tadi yang kapal-kapal tunjukkan. Berapa banyak, ada *nggak* 500 kapal yang ditambah ini? Coba, kalau terjadi kebakaran seperti kemarin di Tegal, Cilacap, apa *nggak* habis ini. Ada *nggak* alat pemadam? Tidak ada. Saya tanya, apa sebabnya begini? Anda merubah ya, saya kan selalu keliling-keliling iya kan. Saya tanya, yang namanya cakalang itu umurnya berapa sampai berapa lama cakalang? Anda Dirjen Tangkap kalau *nggak* tahu berhenti aja, terus terang saya katakan. Cakalang umurnya berapa, beratnya berapa? Jawab.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP KKP (DR. IR. MUHAMMAD ZAINI, M.M.):

Cakalang itu bisa sampai 5 tahun Pak.

KETUA RAPAT:

5 tahun.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP KKP (DR. IR. MUHAMMAD ZAINI, M.M.):

Beratnya bisa sampai 5 kilogram keatas, Pak.

KETUA RAPAT:

5 kilo?

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP KKP (DR. IR. MUHAMMAD ZAINI, M.M.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Kalau 5 tahun tuh *nggak* sampai 5, kalau 5 kilo itu *nggak* sampai 5 tahun, paling lambat umurnya 1 tahun, mati. Paling berat 7 kilogram mati ikannya. Jadi anda tuh membuat peraturan baru ini dengan mata jaring 3 inch yang 5 kilo masuk *nggak*? Kagak masuk. Paling top 4 kilo cakalang masuk di 3 inch. Ini kan pada digantung semua. Pulang, anda harus ganti jaring dengan mata 3 inch, kalau tidak, tidak saya perpanjang.

Keluhan ini semua menuju ke saya. Kok seolah-olah DPR ini Komisi IV tidak pernah membela nelayan. Anda kan ahli, Dirjen Tangkap, orang kepercayaannya Pak Menteri, orang kepercayaannya Pak Sekjen. Coba terbayang *nggak* kalau cakalang 5 kilo aja lolos dari 3 inch mata jaringnya, mau jadi apa ini? Dan itu wajib harus ganti, kalau tidak ganti tidak saya perpanjang izinnya. Makanya kan di sana. Saya minta juga nanti Komisi IV adakan sidak lagi. Termasuk limbah-limbah kemarin ya Pak Dirjen PSDKP, kemarin kan udah di segel nih, sekarang masih masih banyak yang membuang limbah ke ini karena saya minta tolong juga sama Dirjen dari LHK. Cobalah, kalau 4 kilo cakalang lolos iya kan apa yang akan didapatkan cakalang dengan 3 mata inch dengan 3 inch itu mata jaring? Kalau 2 inch ya mungkin masih ketangkap lah yang 4 kilo, 5 kilo, kalau udah 3 inch *nggak* mungkin ketangkap. Tadi ada yang

mengatakan 5 tahun, umurnya paling setahun mati ikan cakalang. Saya bukan kata pengusaha, saya tidak pernah percaya sama pengusaha, saya pun bertanya kepada orang-orang yang ahli perikanan dari Unair dan lain-lain.

Termasuk masalah PMK kemarin itu. Saya nih mohon maaf saya *nggak* pernah lagi rapat megang *handphone*, tetapi karena saya bodoh saya selalu *handphone*, saya bilang ikut saya supaya saya dapat masukan yang jelas. Dirjen PKH mengatakan, oh PMK gampang diatasi. Semua guru besar bilang, Iya kata kamu gampang nyatanya kan *nggak* gampang. Coba minta tolong Pak Menteri, Pak Sekjen ini di evaluasi lah ya, saya *nggak* mau ada seperti ini lagi. Paling tidak kan ini coba lihat nanti kalau perlu Pak Menteri, Pak Sekjen atau siapa sama saya kita sidak ke sana, termasuk Perindo juga untuk penanggungjawab masalah limbah. Sekarang pabriknya berapa banyak di sana, masing-masing punya ada yang punya pengolahan limbah tersendiri, ada yang tidak. Yang tidak ikut pengolahannya yang dikelola oleh UPT begitu kan, betul *nggak*? Daya tampungnya berapa? Dan Perindo juga salah, buat peraturan baru, buat keputusan baru, setiap limbah wajib dimasukkan dalam program pengelola Pelabuhan, tidak ada yang namanya limbah mandiri tidak ada. Mereka limbah mandiri siapa kontrol, kan *nggak* ada, selesai buang aja ke laut. Karena apa? Mereka yang dipikirkan cuma apa? biaya murah untung besar, tapi mereka kan tidak menjaga kelestarian alam kita, iya kan. Yang jelek siapa? Ya Kementerian lah, Kementerian Kelautan.

Saya tidak mau mitra saya jelek, maka kan saya kencang terus kalau ngomong. Saya itu tanggal 28, kenapa saya dapat foto? Tanggal 28 saya makan kok (*suara tidak jelas*) Pak Menteri makan ke Sushi Masa saya lihat. Kok kapal banyak amat ini, kenapa? Masalahnya apa? Itu loh, kasihan Pak. Mohon maaf kalau cukong-cukong itu kapal dia *nggak* jalan tetap makan, tetapi ABK-nya bagaimana? ABK kan cuman bagi hasil, kalau *nggak* kerja, *nggak* jalan ya *nggak* dapet duit, *nggak* makan. Kita pikirkanlah, itu semua rakyat kita loh. Coba Pak Menteri pendapat Pak Menteri bagaimana kalau masalah begini? Harusnya kan di evaluasi dulu dari 2 inch menjadi 3 inch, ini lho maunya saya. Ajak dulu diskusi, ajak dulu ngobrol teman-teman pengusaha, jangan tiba-tiba dikeluarkan langsung, udah balik *nggak* bisa perpanjang kalau *nggak* gini. Inget Pak Menteri mana yang biasa ngurus ekspor siapa, Dirjen siapa? (*suara tidak jelas*) Ingat kata-kata saya hari ini ya ekspor Cumi kita akan turun jauh, betul? Sudah mulai turun kan ekspor cumi kan? Semua pada ngeluh pengusaha. Keluhan pengusaha bagi saya, emang gue pikirin, tapi yang saya pikirkan tuh ABK yang tadi Pak Menteri, iya kan. Saya maunya di zaman periode ini Kementerian Kelautan dipuja iya kan bahwa kebijakan Kementerian Kelautan pro ABK, pro rakyat. Karena kemarin saya dapat masukan ini, kalau PMK ini meledak di Indonesia kami akan membuat patung Menteri Pertanian sebagai pencetus penyakit mulut dan kuku, wah kebayang *nggak*? Saya *nggak* mau Pak Menteri juga ada patungnya, *nggak* mau saya ya. Saya *nggak* punya kepentingan apa-apa, saya *nggak* punya kapal ikan, *nggak* seperti temannya Pak Budi, itu Abangnye Alien tuh.

Ada lagi? Pak Menteri mau menjawab? Ya silakan, singkat, karena tadi sudah saya jadwalkan 16.30 WIB paling lama jam 17.00 WIB kita sudah langsung bubar, karena nanti Pak Budi mau salat magrib juga beliau.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Terima kasih, Ketua.

Pimpinan dan seluruh Anggota yang hadir,

Ada banyak pertanyaan tadi dari fraksi-fraksi. Saya mohon izin kalau yang dari Fraksi akan saya jawab secara tertulis, biar lebih lengkap. Namun ada satu hal yang menurut saya ini menjadi satu perhatian dari.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri, sesuai kesepakatan kami di internal yang fraksi dijawab tapi dalam rangkuman satu jawaban, tetap dijawab dulu ya. Tidak boleh jawaban tertulis, tapi setelah itu ada jawaban tertulis. Jadi misalnya si A Mbak Kiki, Mbak Ria, Pak Andi Akmal itu jadi satu, jawab aja sekaligus biar singkat. Termasuk tadi pendalaman. Setelah itu tetap harus dijawab dengan tertulis, karena itu saya ini kan cuman mimpin Rapat, ini kan bos-bos saya semua perintah saya.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Terima kasih Pimpinan.

Bisa ditampilkan *slide* nomor 5, nomor 6, nomor 6. Baik. Tadi banyak sekali yang yang mempertanyakan diantaranya adalah Pak Sema, terus kemudian Ibu PKS, kemudian juga Bu Kiki, Bu Saidah ya dan secara umum kira-kira gambarannya seperti apa.

Data yang saya tangkap dari Komisi Nasional Kebijakan atau Kajiskan itu adalah 12 juta ton kurang lebih apa namanya total ikan kita yang ada di Indonesia di seluruh Indonesia. Lalu kemudian kita coba bagi per WPP, kemudian kita buat zonasi. Ini sebetulnya kita buat untuk menjawab secara keseluruhan, kira-kira seperti itu. WPP 711 itu kita sebut sebagai zona 1. Lalu zona 2 itu ada 716, 717. Zona 3 itu 715, 718, dan 714. Lalu kemudian zona 4 itu adalah 572, 573, itu yang paling panjang. Nah itu kita bagi menjadi sebagai berikut:

Jadi kalau di zona 1 itu ada 911.000 ton per tahun. Itu data dari Kajiskan, jadi kalau *nggak* saya pakai dari data itu dari mana? Tapi satu sisi sebetulnya kalau saya teliti lagi itu kan *scientist* datanya ya, dari mana? dari *Logbook*. Nah sekarang *Logbook* itu seperti apa? sudah saya anggap benar saja dulu Ibu, Bapak, jadi saya pikir kalau ini kita terapkan nanti kemudian akan kita awasi dengan *slide* nomor 11, coba *slide* nomor 11. Nah kita akan awasi dengan ini, kita tuh sudah punya satelit sebetulnya yang terkoneksi langsung dengan

seluruh kapal yang mangkrak. Yang menjadi soal satelit ini tidak dihidupkan dari 2017, ini yang kita mau hidupkan.

KETUA RAPAT:

Itu kalau *nggak* salah yang di Bali ya yang kita waktu itu apa apa.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Iya Perancak. Nah ini kita hidupkan Pak, sedang dalam proses, sedang dalam proses kita hidupkan.

KETUA RAPAT:

Kira-kira sedangnya dari awal udah berapa lama sedangnya?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Mohon izin Pimpinan.

Untuk menjalankan ini semua tadi itu, itu kan tetap harus ada payung hukum. Mohon izin saya sampaikan di sini proses payung hukum Peraturan Menteri yang yang memayungi ini semua supaya kita tidak salah dalam menjalankan sampai hari ini belum selesai, sampai hari ini masih tertahan dan itu cukup lama dari bulan Oktober 2021. Jadi memang ya begitulah kira-kira kita sudah *push*, saya, Pak Sekjen sudah *push*, jadi saya berusaha tapi saya yakin.

KETUA RAPAT:

Kalau, kalau dilanggar bagaimana? Hantam aja.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Nggak bisa, nanti saya masuk penjara Pak.

Jadi mohon izin Pak Sema, jadi kalau tadi awalnya saya punya keyakinan bahwa kita itu Rp224 triliun kalau 10% aja Rp12 triliun Pak. Saya juga meneliti sebetulnya, nah coba apa namanya *slide*, ini biar data, ini kalau kita data lebih enak Pak. *Slide* nomor yang data tentang nelayan, *slide* nomor berapa, 10 ya. *Slide* tentang nelayan, zona di penangkapan ikan terukur, terus sebelumnya, nah ini ya ini, sebelum-sebelumnya, nah ini. Yang nelayan betul, yang nelayan betul, di zona 1 itu ada 178000, nelayan betul dia punya kapal kecil-kecil, yang nelayan betul, ini data yang kita dapat nih.

Kemudian di Provinsi di zona 3 itu ada Provinsi Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, itu ada 187.000. Nah kalau saya lihat zona 3, zona 3 itu ikannya paling besar kira-kira sekitar 2,5 juta ton itu paling besar, jadi kalau Ibu, saya tidak mengatakan bahwa itu adalah Lumbung Ikan Nasional saya setuju, itu betul. Nah, ini yang

akan kita betul-betul kita terapkan dengan berbagai model salah satunya terukur itu supaya tidak liar karena yang dari sana itu ditangkap dari, ini nelayan zona 6 Pak zona 6 dan zona zona 6 terutama yang paling besar itu melaut semua ke sana dibawa balik lagi ke ke Jawa. Ya, tadi kalau kemudian Pak Ketua tadi melihat, kemudian kapalnya numpuk semua di situ ya itulah yang terjadi. Jadi bayangin, ikan ini matinya sudah berbulan-bulan ini sebetulnya *nggak fresh*. Nah ini akan kita coba dengan penerapan terukur itu bahwa mereka di sana ya harus di sana, dia nangkap di sana harus diproses di sana, ini harapan kita gitu supaya ekonominya tumbuh di sana. Nah, kapan ini mau diterapkan? Sampai hari ini penangkapan ikan terukur itu belum jalan, jalannya dari mana? Jadi kalau mau dijalanin belum jalan, karena yang namanya Permentnya sedang dalam proses. Kita ingin mudah-mudahan ini bisa dipercepat dalam minggu-minggu ini sudah, saya juga terus terang aja udah pengen.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan izin. Boleh?

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pak Menteri, terima kasih, Pak Menteri.

Kenapa tadi saya menekankan ini? Karena hampir semua orang berpikiran PP 85 ini sudah diterapkan.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Belum.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Makanya terima kasih, Pak Menteri menegaskan disini untuk menjelaskan bahwa PP 85 ini sebenarnya belum.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Belum.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Nah berarti PNPB yang kita pikirkan akan didapatkan dari hasil tangkapan terukur juga belum bisa diukur di tahun 2022 ini. Betul kan Pak?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Betul.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ya tolong ditegaskan seperti itu Pak.

Terima kasih.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Terima kasih, Ibu.

Jadi, jadi kami sampaikan kembali sebenarnya PP 85 itu juga sebuah keadilan, karena tadi saya katakan nelayan ini kan totalnya 2,2 juta kalau kita menghitung yang paling besar itu adalah pulau Jawa Zona Utara dan Zona Selatan. Zona Selatan 522.000, Zona Utaranya 576 576.000, jadi hampir satu juta kira-kira itu di Pulau Jawa nelayannya paling besar dan itu menangkapnya semua di sana di Maluku yang dibawa ke sini begitu. Nelayan-nelayan di zona 3 sendiri yang paling besar cuma 187.000, nah kemudian ini nelayan yang harus kita lindungi, caranya adalah bagaimana supaya mereka misalnya BBM-nya nanti misalnya kalau perlu benar-bener dia bisa dapat BBM yang murah atau bisa dapat subsidi. Caranya adalah industri hadir di situ yang bisa membeli hasilnya mereka, pabriknya juga hadir di situ, lalu kemudian dia kita belikan kuota untuk menangkap di zona itu, lalu kemudian dia kita pungut. Kalau yang ini *nggak* kita pungut sama sekali begitu, nah itu yang kita pungut nah hasilnya itu kita gunakan untuk kepentingan itu.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Iya, *nggak* saya cuman ini saja melanjutkan yang tadi, biar dia *nggak* ini Pak Ketua.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Iya, jadi itu maksudnya. Tapi ini belum jalan sama sekali Bu ya, jadi kalau ditanya apakah ini sudah jalan? Belum, belum jalan karena kita belum bisa menjalankan ini selama payung hukumnya belum selesai. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan.

KETUA RAPAT:

Ibu mau nanya apa? Silakan.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Iya, Pak Ketua.

Pak Menteri. Kalau tadi disampaikan Pak Menteri bahwa belum jalan, sementara waktu saya ke Aru itu sudah ada kapal-kapal yang memang seolah-olah ya Pak Menteri sudah menerapkan PP 58 ini Pak eh 85 ini. Dan saya minta waktu itu agar ada mungkin dari ada ini dari Dirjen apa lah ya yang bisa Perikanan Tangkap ya Pak Zaini ya yang mungkin bisa menjelaskan soal fakta yang di lapangan itu yang saya sampaikan ke sini waktu itu Pak Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan Pak Menteri.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP KKP (DR. IR. MUHAMMAD ZAINI, M.M.):

Terima kasih, Ibu.

Di PP 85 ini substansinya ada dua Bu. Yang pertama adalah pra produksi seperti yang sudah ada sebelumnya, hanya yang berubah itu adalah tarif dari dan juga harga patokan ikannya, ini sudah berjalan. Kemudian untuk PP 85 yang kedua itu adalah PP 85 dengan *pasca* produksi dan sistem kuota, pra produksi eh *pasca* produksi dari sistem kuota ini belum dilaksanakan sampai sekarang karena masih menunggu Permen yang sedang kita *godog*. Jadi itu Bu ini, jadi yang yang sudah berlaku itu adalah pra produksinya dengan tarif yang sudah disesuaikan dengan harga ikan terbaru.

Nah, kemudian berkaitan dengan kapal Ibu mungkin yang disebutkan adalah kapal-kapal yang sebelumnya sudah operasi itu adalah tetap bukan mengacu kepada PP 85, tapi kepada Permen-Permen sebelumnya termasuk juga kepada PP 27 maupun PP 05 bukan kepada PP 85 dan turunnya ada Permen-Permen ya juga sudah selesai dilaksanakan itu sudah diterapkan secara bertahap.

Saya kira itu.

Terima kasih Bu.

INTERUPSI F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Iya interupsi lagi, Pak Ketua. Saya lanjutkan ya Pak Ketua ya, mohon izin ya.

Berarti yang sudah jalan adalah pra produksi kalau tadi menurut Pak Zaini merujuk ke PP 85, iya ya Pak Pak Zaini ya? iya. Padahal yang disampaikan Pak Menteri bahwa PP 85 ini belum disahkan, ditetapkan, masih harmonisasi ya Pak Menteri ya?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Bukan, bukan, bukan PP-nya harmonisasi. Kan kalau menurunkan untuk menjalankan penangkapan terukur kan harus ada Permen, Peraturan Menteri, yang *pasca* tadi. Nah Peraturan Menteri ini belum jalan. Kalau yang pra itu

seperti yang lalu-lalu sama, hanya berubah tarifnya saja Bu gitu, jadi HPI-nya saja yang berbeda. Iya hanya patokan harga ikan saja, itu tidak ada yang berubah. Yang akan kita terapkan di Penangkapan Terukur itu adalah yang pasca gitu dan itu belum, belum dijalankan, karena harus ada Peraturan Menteri.

Demikian.

KETUA RAPAT:

Jadi sampai sekarang PP-nya belum, belum, belum.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

PP-nya sudah ada.

KETUA RAPAT:

PP?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Iya. Permennya belum.

KETUA RAPAT:

Permennya belum?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Belum. Jadi kita belum bisa terapkan.

KETUA RAPAT:

Jadi dianggap masih belum berlaku?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Belum, dan belum diterapkan.

KETUA RAPAT:

Ingat ya Bu, belum berlaku, belum diterapkan. Karena Permen dari PP kan Permen, nah Permennya belum diteken. Permen itu harus minta persetujuan juga dari Kemkumham kan gitu?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Iya, Presiden sekarang lagi nunggu dari Presiden.

KETUA RAPAT:

Oh ke Presiden?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Iya. Begitu.

KETUA RAPAT:

Lanjut, ada lagi?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Kebetulan Pak Daniel Johan belum datang, tadi menanyakan soal lobster. Terhadap lobster kita sudah intens juga bicara dengan Dubes kita yang ada di Vietnam untuk kemudian menjajaki bicara. Memang sampai dengan hari ini sudah ada beberapa dari swasta yang jadi B to B gitu sudah mulai itu di daerah Kendari sudah mulai, tapi masih *trial*. Tapi sementara yang lainnya adalah masih seperti yang lama, sifatnya *fattening*. Kemudian kita juga ada beberapa perubahan di Permen 17 ya untuk menggeser supaya dia bisa *mobile* penangkapannya itu bisa digeser ke tempat *fattening- fattening* yang sudah dilakukan.

Tapi kemarin juga kita belajar ke Norway untuk bagaimana bisa melakukan pembibitan, karena di Norway itu sudah berhasil melakukan pembibitan. Mudah-mudahan itu teknologinya bisa diterapkan di sini sehingga kemudian, karena kalau itu bisa dilakukan akan bisa mempercepat produksi kita. Kira-kira seperti itu.

INTERUPSI F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pak Menteri izin. Interupsi Pimpinan.

Ini Pak Zaini, ini logika berpikir saya jadi kebolak balik nih dengar Pak Zaini ngomong tadi. Dalam satu PP ada yang jalan, ada yang *nggak* gitu loh jadi tafsir saya tadi dengar omongan Bapak. Mohon maaf ya Pak Menteri, ini saya ingin meluruskan saja. Jadi pra, pasca, yang jalan, udah jalan, kok bisa dibelah begitu ya, apakah *nggak* ini saya takutnya kita semua salah nangkep nih gitu loh. Saya butuh pencerahan gitu, karena dalam suatu PP apakah mungkin ada yang dilaksanakan apa yang *nggak*, ada yang *nggak* gitu loh.

Okelah, kita memahami Permennya belum ada, oke *that's it*. Tapi tadi yang Bapak bilang PP 85 ini untuk khusus ini, gimana cara Bapak membedakan ini dalam satu aturan satu peraturan yang sama gitu?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Pak Zaini mau jawab? Ya, silakan. Biar Pak Zaini ya jawab ya.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP KKP (DR. IR. MUHAMMAD ZAINI, M.M.):

Baik Bu.

Jadi PP 85 ini ada beberapa yang memandatkan harus ada Permennya Bu. Nah tadi saya sebutkan bahwa PP 85 ini ada 3 cara penarikan PNBK.

Yang pertama adalah pra produksi. Pra produksi ini mandatnya hanya memandatkan kepada Menteri Kelautan Perikanan untuk membuat Keputusan Menteri tentang Harga Patokan Ikan, ini sudah selesai sehingga kalau ini ini sudah dijalankan Bu.

Kemudian yang kedua lagi adalah tata cara penarikannya itu melalui pasca produksi dan sistem kontrak. Nah sistem kontrak juga memandatkan untuk melaksanakan ini harus ada apa harus ada Permennya juga yang sekarang Permennya belum jadi sehingga untuk 2 opsi yang berikutnya ini belum bisa dilaksanakan Bu.

Itu saja.

Terima kasih.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ketua. Sedikit.

KETUA RAPAT:

Ya, Bang Andi.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Mungkin sebelum nanti Pak Menteri mengakhiri.

KETUA RAPAT:

Kita sudah hampir 16.30 WIB.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Iya Pak.

Mungkin butuh ini aja, Pak, Pak Ketua. Tadi kan banyak masukan ya Pak ya dari kami pokok-pokok pikir dari Anggota, mungkin minta komitmen Pak Menteri untuk merealisasikan nanti kedepannya gitu Pak. Itu aja mungkin Pak, *nggak* usah dijawab.

Terima kasih.

F-PD (HJ. NUR'AENI, S.Sos, M.Si.):

Pak Ketua mungkin sedikit dari saya.

KETUA RAPAT:

Ya, setengah menit.

F-PD (HJ. NUR'AENI, S.Sos, M.Si.):

Ya, baik.

Pak Menteri, terima kasih penjelasan terhadap arah kebijakan tentang penangkapan terukur ya Pak Menteri tadi sudah dijelaskan. Saya sependapat tadi dengan teman-teman juga menjadi pertanyaan terhadap PP terbaru, disamping mungkin tadi pemetaan ataupun cara memisahkannya seperti apa. Mungkin yang ingin saya tanyakan, apakah menurut Pak Menteri PP 85 ini akan tetap dijalankan ataukah memang ada bentuk pengecualian? Karena kalau di PP yang lama hanya diberlakukan untuk jenis kapal 30 GT saja yang dipungut, tapi saya melihat di PP yang terbaru 85 ini jenis 5-10 GT juga dikenakan tarif. Nah ini mohon dikoreksi bahkan saya sih mendorong agar ada pengecualian pengecualian mohon dijelaskan, kalau *nggak* salah Pak Zaini ya.

Nah, mungkin yang terakhir juga, apabila memang ini belum diberlakukan berarti kan ada rencana untuk Permen-permen yang akan dikeluarkan, ada 2 Permen rencananya dalam PP 85 tersebut 2 Permen yang akan dikeluarkan. Mohon itu juga untuk dievaluasi terhadap HPI, karena jenis ikan mengalami peningkatan, akan tetapi jenis udang ini mengalami penurunan harga di angka Rp1.000,-. Ini mohon penjelasan Pak Menteri.

Terima kasih.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Izin Pimpinan.

Pak Zaini biar menjelaskan. Silakan Pak Zaini.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP KKP (DR. IR. MUHAMMAD ZAINI, M.M.):

Baik, Bu.

Jadi kami akan melakukan evaluasi, tetapi ini kan sudah berjalan, artinya bahwa PP 85 sudah berjalan. Kemudian di dalam PP 85 di Pasal 3 ayat (2) kalau tidak salah di situ disebutkan bahwa PP 85 hanya berlaku untuk izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Siapa atau yang kena dampaknya itu yang mana? Itu adalah yang paling utama adalah kapal-kapal di atas 30 GT. Sedangkan kapal-kapal yang dibawah 12 eh anu dibawah 30 GT izin daerah, jadi sepanjang izin dikeluarkan daerah maka PP 85 tidak berlaku.

Nah, kemudian di dalam lampiran itu memang disebutkan bahwa kapalnya itu ada 5 sampai 60 disebutkan, ini karena adanya permintaan dari daerah-daerah tertentu yang nelayannya itu selama ini menangkap ikan di atas 12 mil. Nah didalam aturan yang lama, penangkapan ikan ini ada kesenjangan hukum. Jadi daerah itu mengeluarkan izin daerah penangkapannya di atas eh di bawah 12 mil, kapalnya di bawah 30 GT. Kemudian pusat mengeluarkan izin kapalnya di atas 30 GT, awal wilayah tangkapnya diatas 12 mil. Nah, sehingga kapal-kapal yang dibawah 30 GT yang dia khusus untuk menangkap ikan-ikan di atas 12 mil tidak dikeluarkan izin oleh daerah, tidak dikeluarkan izinnnya oleh Pemerintah Pusat sehingga ini menjadi kekosongan hukum. Nah, akibat ini ada permintaan khususnya dari Provinsi Bali karena memang di sana kapal-kapal dibawah 30 GT menangkap ikan tuna yang khusus ikan tuna itu adanya diatas 12 mil sehingga ini dimasukkan, ini yang diminta untuk dimasukkan di PP 85. Sementara yang lain yang tidak khusus menangkap diatas 12 mil dan izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, maka PP 85 ini tidak berlaku.

Terima kasih.

INTERUPSI F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan.

INTERUPSI F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi, Pimpinan.

Ada Biro Hukum *nggak* sih Pak? Ada yang ikut *nggak*? *Nggak* ada ya. Mungkin Pak Anton, juga Pak Manopo, mantan Polisi juga, saya juga ngedengernya ini jadi bingung. Karena tadi dibilang, tadi saya bilang *nggak*, terus terpisah, gimana ya. Karena gini Pak, kebetulan saya juga sedikit banyaknya ngerti lah masalah hukum, hukum itu satu kesatuan. Bapak lempar lagi ke Perda nih barusan iya kan ke daerah nih ya, beda lagi itu regulasinya gitu loh. Jadi tolong konsep.

Mohon maaf Pak Menteri ya ini kita mencoba meluruskan supaya ini nyambung gitu. Tadi ada yang jalan, ada yang *nggak*, jadi sebenarnya kita cuma mau kepastian PP 85 ini jalan atau *nggak*? itu aja *that's it*. Nah tapi kalau satu PP dipecah-pecah dan tadi Pak Menteri sudah sampaikan ini belum ada payung hukum dari Permen, Oke *I mean, sorry* Pimpinan ini agak bingung saya.

Terima kasih.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Saya jawab Bu, saya jawab Bu Kiki.

Jadi dulu didasarkan PP 85 itu adalah dari PP 75. PP 75 itu mengatur dimana Harga Patokan Ikan itu masih yang lama, jadi itu udah berlaku sangat lama. Sementara, nah itulah kemudian pendapatan PNBP-nya sangat rendah sekali. Kemudian diubah menjadi PP 85 itu ada ada 3 skema sekaligus dalam PP 85 itu.

Yang pertama adalah pra produksi, itu seperti yang lama PP 75. Lalu kemudian di dalamnya yang kedua adalah *pasca* produksi, ini untuk keadilan sebetulnya, jadi orang melaut kalau *nggak* dapat ikan ya jangan bayar dong, nah itu kira-kira begitu. Lalu kemudian yang ketiga ada sistem kontrak, nah ini yang untuk penerapan terukur. Jadi sistem kontrak itu akan dikenakan untuk itu. Nah sistem kontrak itu kalau dijalankan harus dengan Permen, nah Permennya belum ada maka itu belum bisa dilaksanakan begitu.

Sebetulnya sih *nggak* ada yang *nggak* ada yang sulit ya sebenarnya, *nggak* ada yang masalah. Ada yang jalan, ada ada yang tidak, ada yang belum, kan ada 3 tadi saya sebut. Di dalam PP 85 itu ada kandungan di dalamnya adalah:

Satu, pra produksi. Itu berarti sama dengan PP 75 yang sebelumnya, itu jalan. Lalu kemudian yang kedua, *pasca* produksi. Dia dipungut PNBP kalau dia mendapatkan ikan, kalau *nggak* dapat ikan dia *nggak* dipungut ya. Yang ketiga, sistem kontrak ya. Sistem kontrak, itu kalau apa namanya untuk penangkapan ikan terukur dan itu belum dijalankan karena harus ada Permen, begitu.

KETUA RAPAT:

Jadi judulnya yang sistem kontrak belum berjalan.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Belum dijalankan.

KETUA RAPAT:

Alien mau ngomong, terakhir. Setelah itu kita buat kesimpulan rapat.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih, Ketua.

Tadi yang sudah disampaikan Pak Menteri ada 3 skema yaitu pra, pasca, dan juga sistem kontrak ini turunan dari PP 85 juga kan Pak, turunan dari 85. Yang tentunya yang membingungkan membingungkan kita semua itu memang karena satu peraturan itu seharusnya kan sinergi dan berkesinambungan dan satu, sehingga kalau memang ada pemecahan seperti ini bahwa ada pasca dan pra yang tadi Pak Menteri sampaikan sesuai dengan PP 75 ini ada berarti bawaan juga sebenarnya dari PP yang sebelumnya iya kan yang dilakukan dan dilanjutkan untuk masuk dalam satu kesatuan dari peraturan PP 85.

Untuk sistem kontrak penangkapan terukur, saya yakin dan percaya Pak Menteri pasti sudah ada beberapa investor ada ada atau para pengusaha nelayan tangkap ikan sudah mengajukan izin ini, belum? kalau memang belum pasti kita tahu. Tapi nanti kita akan kejar di RDP, karena mungkin belum bisa saat ini. Karena tadi seperti yang Ibu Saadiah sampaikan memang di beberapa daerah Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa karena ini PP 85, PP 85, dan PP 85, seperti itu Pak. Berarti secara tidak langsung mereka menyatakan bahwa PP 85 ini secara keseluruhannya tanpa ada pemisahan dari 3 skema tersebut sudah jalan Pak Menteri.

Yang ini saya sampaikan juga bahwa kalau memang seperti ini ya harus diberitahukan lagi Pak, nanti kan ada boomerang nih seolah-olah PP 85 sudah jalan padahal ada skema-skema tertentu yang belum yang belum jalan, dari 3 skema tersebut 2 yang sudah bisa jalan, satunya belum bisa jalan dan ini peraturannya yang harus bisa di bisa disampaikan Pak agar menjadi ketegasan di semua wilayah. Apalagi tadi Bapak udah menerangkan beberapa zona yang memiliki hasil tangkap yang besar apakah ini juga karena mereka merasa atau hasil tangkap ini sudah masuk dalam PP 85 kah? kan begitu Pak, karena kita mau menargetkan PNBPN. Kalau memang seperti ini berarti kita yakin dan percaya hasil dari PNBPN yang didapatkan, kalau *nggak* salah kemarin 900 sampai 1 triliun bukan dari hasil tangkap perikanan terukur, iya, karena ya karena PP 85 ini ternyata belum berjalan. Ini Pak simpang siur ini Pak yang perlu diperjelas.

Itu saja Pimpinan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Izin terakhir beri saran Pimpinan.

Pak Menteri, saya izin memberikan saran ini kepada para Dirjen. NSPK anggaran NSPK di setiap tahun itu norma itu kan norma itu salah satunya adalah PP atau Permen atau yang dimaksud Pak Menteri kan Kepmen turunannya itu kan. Tolong dibuat secara benar, anda membuat aturan ini kan harus berlaku nasional, *nggak* bisa setengah-setengah. Masa anggaran NSPK tiap tahun ada, tapi masa bikin PP kayak begitu Pak Zaini dan teman-teman. Tolong ya, ini saran loh Pak Menteri saran supaya kita saling evaluasi ke depan.

Terima kasih.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Iya iya, iya Pak Ketua.

Iya Pak Menteri mohon maaf Pak Dirjen. Ini saya ulangi lagi Pak Ketua, soal yang tadi disampaikan Pak Zaini tadi ini karena ada keluhan soal harga ikan yang naik ya keluhannya oleh Pemerintah Daerah ya 1000 sampai 2000 kali lipat. Kalau tadi disampaikan Pak Zaini bahwa ini PP 85 ini hanya untuk pra produksi memang bandingannya dengan PP 75 Pak Menteri, jadi kalau di PP

75 ini sesuai dengan Undang-Undang 23 bahwa di atas 12 mil atau di kapal diatas 30 GT itu adalah urusan kewenangannya ke pusat. Nah di PP 85 ini ini bahkan diatur 5 sampai 60 GT Pak Menteri diatur bahwa 5% kali produktivitas kapal kali Harga Patokan Ikan kali ukuran GT kapal disetor ke PNBP, nah ini kan kontradiksi yang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Zaini. Ini kalau di PP 75 jelas diatur 30-60 GT, tetapi kalau PP 85 masuk tuh kewenangan kewenangan Pemerintah Daerah, ini yang jadi komplain dari Pemerintah Daerah. Nah saya minta kalau misalnya ini masih ada dicabut lah Pak disesuaikan dengan apa undang-undang lah diatas 30 GT begitu kira-kira Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih. Saya sudah paham.

Jadi maksudnya gini kurang lebih. Berikan wewenang kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi kewenangannya dibawah 12 mil atau berapa GT? Titik. Selebihnya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya lagi ngomong.

Diatas 30 GT misalnya itu kewenangan pemerintah pusat, silakan. Jadi jangan ada oh Bali mintanya begini, besok NTT bilangya oh begini, Maluku minta begini, yang *nggak* minta-minta gitu cuma Lampung karena ikannya pun sudah *nggak* ada. Iya kan, ini harus jelas. Jadi peraturan itu tidak bisa dipisah-pisah, dipecah-pecah, ini kan *nggak* jelas.

Silakan Pak Ansi, 1 menit.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Yang pertama mungkin perlu dievaluasi Pak, PP ini nomor 85. Yang kedua tolong PP ini kalau dibuat jangan kontradiktif dengan Undang-Undang Perlindungan Nelayan dan Petambak Garam karena undang-undang lebih tinggi Pak.

Yang berikut yang saya pahami tentang PP ini, PP ini mengatur tentang: Satu, perizinan kapal berdasarkan GT. Yang kedua, mengatur juga tentang hasil tangkapan itu harus disetor sebesar 5% kalau tidak salah Pak. Nah ini keluhan datangnya dari nelayan Pak Zaini ya, ini terus terang Pak Menteri saya *nggak* ngomong sama Pak Menteri, saya ngomong sama Pak Zaini aja nih. Iya begitu. Jadi saya minta tolong di evaluasi.

Yang berikut, selain evaluasi.

KETUA RAPAT:

Ini evaluasi Zaininya apa peraturannya?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Ini yang saya mau tambahkan ini nih. Yang saya mau tambahkan ini nih yang saya mau tambahkan ini. Pak Zaini ini harus dievaluasi betul. *Nggak*, serius Pak, Bapak ini menjelaskan ke kami membingungkan Pak, iya. Tolong Pak, Bapak harus hadir sebagai *problem solver* Pak, tolonglah bantu Pak Menteri ini Pak, Pak Zaini terutama. Tolong Pak, kalau kita sudah omong seperti ini lagi terus Bapak juga belum berubah *performance*-nya. Ya, menurut saya ya *merit system*-nya harus jalan Pak Menteri, *reward and punishment* jelas lah. Ini *nggak* ada kepentingan lho kita ngomong nih ya, kita omong untuk kepentingan merah putih.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Sebelum saya mengambil kesimpulan, kita ngambil kesimpulan. Ada pertanyaan yang harus dijawab langsung karena akan kami masukkan ke dalam kesimpulan rapat. Apakah apakah kegiatan kegiatan ini MIAMARI yang mangkrak di dua tempat, pertama Pangandaran, kedua Morotai akan dilanjutkan atau di *stop*? Supaya jelas. Kalau dilanjutkan tahun 2000, saya yakin 2022 tidak ada anggaran, 2023 tidak ada anggaran, jadi akan saya masukkan dalam kesimpulan bahwa MIAMARI ini *stop* dengan nanti biar di audit BPK. Pejabat dahulu yang berbuat sembrono membuat, merencanakan, biar diperiksa oleh aparat hukum.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya. Bingung kan Pak Menteri jawabnya.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Iya jadi, terhadap dua hal tersebut MIAMARI dan PIAMARI menurut pandangan kami adalah untuk MIAMARI itu akan kita alihfungsikan untuk kegiatan pendidikan vokasi, pelatihan masyarakat, dan *basecamp* penyuluh.

KETUA RAPAT:

Yang MIAMARI?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

MIAMARI.

KETUA RAPAT:

MIAMARI?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

MIAMARI.

Lalu MIAMARI itu sudah dimanfaatkan sebagai lokasi wisata laut masyarakat dan pelajar, digunakan sebagai TEFA produk Prodi Teknologi Kelautan dan kedepan juga akan digunakan sebagai pelatihan Kelautan dan wisata bahari.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tadi MIAMARI jelaskan sekali lagi saya agak, agak, agak kurang jelas.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

MIAMARI.

KETUA RAPAT:

MIAMARI yang di Morotai misalnya. Coba MIAMARI.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

MIAMARI akan dialihfungsikan untuk kegiatan pendidikan vokasi, pelatihan masyarakat, dan *basecamp* penyuluh.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri tahu *nggak* di sana itu Morotai pendidikannya apa yang mau masyarakatnya berapa? Jadi kalau bilang, oh nanti Budi Sudrajat Djiwandono akan pergi akan berlatih masalah kelautan ke Morotai. Ongkosnya berapa? Kalau Budi Sudrajat Djiwandono konglomerat, nah kalau rakyat biasa gimana? Kan gitu Pak Budi.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Izin Pimpinan.

Makanya saya mau sampaikan ke Pak Menteri bicaranya agak besar karena itu tadi Pak, mau ke sana aja kalau Pak Menteri ya bisa langsung tapi

kalau masyarakat biasa mikir-mikir dulu. Jadi tolonglah Pak, tolonglah Pak, ini kan Rapat Terbuka, Pak ini semua orang setiap kali rapat dengan KKP langsung dan didengar oleh masyarakat Pak. Jangan sampai saya menindaklanjuti apa yang Bapak sampaikan, orang udah *nggak* pilih saya lagi jadi Anggota DPR.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya sesuai jadwal awal, tadi kita sampai 16.30 ,saya perpanjang sampai jam 17.00 selambat-lambatnya.

(RAPAT:SETUJU)

Ya, jawab lagi MIAMARI tadi. Kira-kira begini, *nggak* usah bilang apa lah. Eselon III-nya Kementerian Kelautan, kalau mau belajar ke sana kira-kira ongkos pribadi mampu *nggak*? Ya udah. Ini kan salah perencanaan dari awal, dari awal sudah saya bilang termasuk juga perencanaan pembangunan Pasar Ikan modern di Muara Baru, dari awal saya yang menentang. Karena saya tahu, ngapain saya bersihin kalau abis dagang kan saya sudah bayar, ada pengelolanya, pengelolanya bilang, kalau gua bayar kan gua gaji orang lagi keluar duit lagi, kurang keuntungan gue, kan gitu. Cobalah kita lihat ke sana kita evaluasi, iya kan. Saat ini kalau pasar modern itu siapa yang mengelola? Perindo atau KUPT? Perindo. Perindo kerja sama sama pihak ketiga lagi? Nah mengenai kebersihan gimana?

DIRUT PERINDO (SIGIT MUHARTONO):

Kami, Pak.

KETUA RAPAT:

Kebersihannya gimana, baunya gimana itu?

DIRUT PERINDO (SIGIT MUHARTONO):

Iya Pak memang ada masalah di pengelolaan limbah, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, limbah dan kebersihan dan baunya.

DIRUT PERINDO (SIGIT MUHARTONO):

Siap.

KETUA RAPAT:

Terus bagaimana menanganinya yang akan datang? Semangatnya itu, wah semangatnya luar biasa itu sampai ngotot-ngotot, sampai saya gebrak meja untuk tidak menyetujui anggarannya. Tapi tiba-tiba, tiba-tiba saja ada Bos saya datang ke sana *ground-breaking*, itu aja.

Jadi ayo kita evaluasi, Pak Menteri. Termasuk juga nanti Perindo, iya kan. Memang kalau kita bisa nanti saya bisa bicara sama Komisi VI kalau bisa menghadirkan Menteri BUMN saya hadirkan di sini, karena harus minta izin Komisi VI, ini mau diapain ya wilayah Pelabuhan? Apa mau diambil lagi atau mau didiamkan. Tapi kalau didiamkan saja yang jelek itu namanya Trenggono, berarti tidak mampu mengelola Pelabuhan dengan baik, walaupun bukan di bawah wewenang Menteri Kelautan, kan gitu judulnya nih.

Saya minta tolong di evaluasi. Mungkin nanti kita akan sidak lagi Komisi IV kebersihan, limbah, saluran air, dan infrastruktur lainnya. Karena saya tahu Pak Dirut Perindo anda *nggak* usah takut lah, di sana tuh banyak ada pengusaha nakal punya 6, 7 Kavling, kalau sewanya satu juta dia akan menyewakan kepada pihak lain dengan harga 6 juta. Karena dia takut, karena ada juga oknum di sono noh, di sono noh yang bilang, ini temen saya punya jangan diganggu, betul *nggak* Pak? Betul kan. Jangan takut Pak kalau Bapak benar lawan aja, yang jelas kalau satu tahun tidak dibangun, cabut. Yang kedua kalau tidak ada oper alih tangan, cabut izinnya, kalau perlu masukkan kesimpulan rapat nanti. Jangan takut Pak, saya tahu kok Pak orangnya siapa yang ngancam-ngancam Bapak itu.

Iya Pak Menteri? Cukup?

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Ketua. izin Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya Allah Bu, satu kali lagi udahan ya?

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Iya, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Iya ini sebelum masuk kesimpulan rapat, Pak Ketua.

Pak Menteri mohon maaf, ini saya minta ada *statement* sedikit Pak Ketua ini. Beberapa waktu lalu kan saya sudah sampaikan sebagaimana tadi yang saya sampaikan, hendaknya ada ya *statement* dari Pak Menteri lah soal anggaran untuk MLIN Pak Menteri. Ya, kalau di sampaikan Pak Dullah tadi bahwa sebelum Pak Menteri itu ada Rp3,1 triliun. Pak Ketua di dalam APBN yang dulu direncanakan *satu koma lima*, nah di sini hendak kita usul berapa ini Pak Ketua. Ini saya lihat banyak sekali ini anggaran untuk pengembangan perikanan budidaya orientasi ekspor nih, ratusan miliar gitu. Kita mau mau hilangkan mana, mau tambahkan mana, harus ada ya *Good Will* lah ya *Good Will* untuk paling tidak kalau 1 triliun atau *satu koma lima* dialokasikan sekarang. Sebelum Pak Jokowi selesai ya Pak Ansi ya, sebelum Pak Jokowi selesai Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Bu, nanti ini hari ini tidak bicara detail. Hari ini gelondongan kita hanya menerima penjelasan, nanti waktu RDP bisa diusulkan. Paham? Karena ini *nggak* ada, ini kesimpulannya hanya menerima penjelasan mengenai Rp6 triliun dan ini minta tambahan Rp2,5 triliun, hanya itu aja, selain itu *nggak* ada lagi.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Maksud saya ada *statement* lah begitu Pak, ada nomenklatur yang yang dibintangi atau apa lah.

KETUA RAPAT:

Oh *nggak* bisa Bu. Nanti RDP baru dijelaskan secara detail.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Masuk kesimpulan ya Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya *nggak* usah, nanti kan kita ada RDP nanti Bu.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Menerima ya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Nggak, nggak usah.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pak Ketua. Ini yang paling akhir sudah.

KETUA RAPAT:

Akhir dari yang terakhir?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Iya.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Iya.

Iya, Pak Menteri *nggak* saya masih mengganjal yang soal MIAMARI, Pak Menteri, karena saya kemarin baru pulang dari sana. Saya, Pak Ketua, Pak Sudin, sama Ibu Alien ini kami keliling Pak ke situ.

Nah, tadi Pak Menteri menjawab mau dijadikan sarana untuk vokasi, dan seterusnya. Menurut kami menurut saya pribadi itu bukan solusi juga Pak. Nah, maksud saya kalau boleh ada solusi yang konkrit, karena terus terang kami ketemu Pak Menteri lagi ini kan belum tentu minggu depan akan ketemu lagi Pak, jadi kalau boleh ada yang konkrit Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Ansi, anda jangan bilang tidak ketemu. Dia butuh kita sampai minggu depan karena harus DIPA.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Oh gitu, kalau Pak Zaini butuh kita *nggak* Pak?

KETUA RAPAT:

Hah?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pak Zaini ini.

KETUA RAPAT:

Oh saya *nggak* tahu, *nggak* butuh kita dia. Makanya ngomongnya kan asal aja.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Izin Pimpinan.

Saya pikir ya ini kan sesuatu yang sudah di sudah dibangun. Jadi saya mohon waktu untuk kemudian kita lakukan satu evaluasi itu menjadi satu kegiatan yang sekiranya seperti apa nanti yang ke depan, jadi nanti dalam mudah-mudahan dalam Raker yang akan datang sudah keluar solusinya yang terbaik.

KETUA RAPAT:

Nah sebetulnya jawabannya yang paling benar itu.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Kalau tidak ada solusinya, kalau tidak ada solusinya, saya akan menyampaikan kepada Pimpinan bahwa ya sudah itu jadi temuan misalnya begitu. Tapi kalau ini memang nanti bisa bermanfaat untuk kepentingan yang lebih baik di sana, karena mohon izin waktu saya pergi ke sana saya pikir itu daerah yang bagus sekali sebetulnya kalau kita kombinasikan dengan ada industri perikanan penangkapan. Terus kemudian juga ada apa namanya tuh wisata karena ada sejarah di situ sebenarnya begitu ya nanti saya evaluasi dulu.

Saya kira demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Dari awal saya kepengen jawabannya seperti itu, kalau langsung jawab pasti salah. Ya. Terima kasih atas tanggapannya.

Sebelum mengakhiri, kita akan membacakan rancangan kesimpulan Rapat Kerja pada hari ini.

Silakan Pak Budi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih, Ketua.

Pak Menteri, mohon nanti dibantu untuk memperhatikan angka-angkanya saja.

Kesimpulan keputusan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-

353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022 sebesar Rp6.104.421.837.000,-. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Rapat Dengar Pendapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komisi IV? Pak Menteri?

(RAPAT:SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai usulan tambahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp2.150.000.000.000,-.

Komisi IV?

KETUA RAPAT:

Sebetulnya ini *nggak* benar ini bikin. Bukan menerima, mendukung. Menerima dan mendukung.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Menerima dan mendukung iya.

KETUA RAPAT:

Bukan penjelasan. Orang Pak Menterinya mintanya cuma *dua setengah*, coba mintanya Rp10 triliun dapatnya 5 nanti, mintanya sedikit-sedikit gimana. Kementerian Kelautannya tetap dicantumkan dong, oh udah.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Saya baca ulang ya.

2. Komisi IV DPR RI menerima dan mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 sebesar Rp2.150.000.000.000,-.

Komisi IV?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan.

Ini bukan *nggak* setuju, saya sangat mendukung kalau ada tambahan. Tapi kenapa Pak Menteri ini mau minta anggaran Rp2 triliun, udah kita masalahnya tentang anggaran, mintanya sedikit-sedikit.

KETUA RAPAT:

Mba Alien, Rp2 triliun itu belum tentu dapat. Apa lagi, tadi saya bilang mintanya Rp10 triliun, dapatnya Rp2,5 triliun.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ya kalau memang belum tentu dapat, ngapain minta. Mintalah 10 dapat 5 gitu. Misalkan Pak, ini kan Pak Menteri lobinya bagus.

KETUA RAPAT:

Pemerintah? Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti masukan dan saran dari Anggota Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja hari ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi IV? Pak Menteri, poin nomor 3?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Setuju.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

(RAPAT:SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai aset yang mangkrak, antara lain:
 - a. Mesin Pembuat Pakan di Satker Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang. Upaya yang perlu dilakukan misalnya dengan menyediakan sarana pendukung untuk operasionalnya atau direalokasi ke Satker lain;
 - b. Keramba Jaring Apung *Offshore* (KJA OS). Upaya yang perlu dilakukan misalnya dengan melakukan percepatan penyelesaian KJA OS dengan PT Perikanan Indonesia (Persero) dan berkoordinasi dengan PT Rajawali Nasional Indonesia/Holding Pangan *ID FOOD*.

DIRUT PERINDO (SIGIT MUHARTONO):

Izin Pak.

Mungkin Perikanan Indonesiannya bukan Persero lagi Pak. Iya.

KETUA RAPAT:

Sepertinya kan wajib karena ini anak perusahaannya RNI loh, wajib koordinasi toh? Anggota? Pemerintah?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT:SETUJU)

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ketua, Ketua, sebentar Ketua.

Mohon maaf ini di KKP juga kan melakukan *Automatic Adjustment* tambahan di tahun 2022 ya. Tadi saya sudah bertanya, tapi belum dijawab. Jadi mohon dengan sangat berapa yang dipotong penganggarannya dan untuk apa saja yang diambil sebenarnya.

Terima kasih Pimpinan.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Saya jawab.

Automatic Adjustment itu sebesar, *Automatic Adjustment* tahap 1 dua ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta.

KETUA RAPAT:

Dua sembilan enam sekian miliar.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Iya dua ratus sembilan puluh enam sekian miliar.

KETUA RAPAT:

Adjustment yang kedua empat sembilan satu, Pak Menteri.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Iya, *adjustment* kedua itu Rp491 miliar lebih. Dan semuanya tidak ada yang mengganggu untuk kepentingan bantuan.

KETUA RAPAT:

Untuk Bansos masyarakat?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Tidak ada ini.

KETUA RAPAT:

Jelas ya. Jadi tidak ada yang untuk Bansos kepada masyarakat.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Tidak terganggu.

KETUA RAPAT:

Tidak ada yang berkurang. Tahunya aman Pak Andi, Biofloknya aman, Pak Daniel aman.

Kalau ketinting itu saya sudah jelaskan ya, ini salahnya di TP kan. TP kita nggak punya apapun hak, jadi suka-suka mereka. Saya minta untuk 2023 tidak ada TP untuk masalah-masalah itu. Kami yang menganggarkan, kami yang membahas, kok kami sepertinya yang jadi pengemis. Tolong bantu ini, ini ini, saya *nggak* mau tetap disinikan saja.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sebelum kami menutup Rapat Kerja hari ini, kami persilakan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan kata penutup. Silakan.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yagn saya hormati Ketua, Pimpinan, dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua masukan, saya anggap sebagai satu masukan yang positif untuk membangun dan mengelola kelautan kita yang memiliki begitu potensi yang besar dan saya meyakini itu adalah sebuah satu kesepakatan sebenarnya intinya bagaimana kita bisa *me-monetize* kelautan kita dan mengelola dengan baik sehingga yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Saya kira demikian.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini.

Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV kami mohon maaf apabila selama kami memimpin ada kekurangan, kehilafan.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, Rapat Kerja ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.00 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. ACHMAD AGUS THOMY
NIP. 196508171988031002